

**MANAJEMEN KINERJA APARATUR DESA DALAM MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN DI DESA TAENG KECAMATAN PALLANGGA
KABUPATEN GOWA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Manajemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

RAHMAYANI
NIM : 50400116053

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

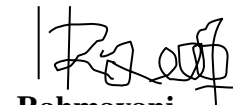
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmayani
NIM : 50400116053
Tempat/Tgl. Lahir : Cambaya, 26 September 1997
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas/Program : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Gusung Desa Taeng
Judul : Manajemen Kinerja Aparatur Desa dalam Mewujudkan Pembangunan di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Taeng- Gowa, 6 Mei 2020

Penulis,



Rahmayani
NIM: 50400116053

PENGESAHAN SKRIPSI

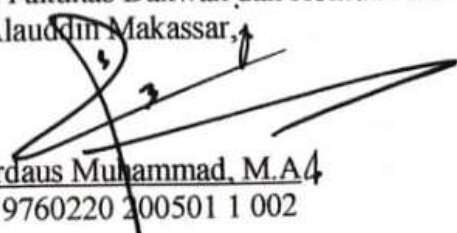
Skripsi yang berjudul, “Manajemen Kinerja Aparatur Desa dalam Mewujudkan Pembangunan di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”, yang disusun oleh Rahmayani, NIM: 50400116053, mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 M, bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah.

Gowa, 4 Agustus 2020 M.
14 Dzulhijjah 1441 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dra. Audah Mannan, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamriani, S.Sos.I., M.Sos.I	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muh. Anwar, M.Hum	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Syam'un, M.Pd., MM	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Irwan Misbach, SE., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Dr. St. Nasriah, M.Sos.I	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar,


Dr. Firdaus Muhammad, M.A
NIP: 19760220 200501 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدِ الرَّسُولِ أَجْمَعِينَ وَالْأَمِينِ وَ عَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Manajemen Kinerja Aparatur Desa dalam Mewujudkan Pembangunan di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”. Salawat serta salam saya haturkan kepada Baginda Muhammad Saw. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan seperti yang kita harapkan.

Untuk itu penulis patut menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Pd.D , Wakil Rektor I Prof. Dr. Mardan, M.Ag . Wakil Rektor II dr. Wahyuddin, M.Hum . Wakil Rektor III Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. dan Wakil Rektor IV Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. Beserta jajarannya.

2. Dr. Firdaus Muhammad, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan, Dr. Irwan Misbach, SE., M.Si sebagai Wakil Dekan I, Dr. Hj. Nurlaela Abbas, Lc., M.A sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Irwanti Said M.Pd sebagai Wakil Dekan III.
3. Dra. Audah Mannan, M.Ag sebagai ketua jurusan Manajemen Dakwah dan Drs. Syam'un, M.Pd., MM sebagai Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah
4. Dr. Irwan Misbach, SE., M.Si dan Dra. St Nasriah M.Sos.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga terwujudnya Skripsi ini.
5. Drs. Muh. Anwar, M.Hum dan Drs. Syam'un, M.Pd., MM selaku penguji I dan Penguji II yang telah memberikan arahan, saran dan masukan sehingga terwujudnya skripsi ini
6. Para Dosen serta Pegawai dalam lingkup Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan Ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Tajuddin Dg.Talle dan Ibunda Rosmina Dg.Nginga yang telah merawat, mendidik, membesarkan, membiayai hidupku sampai menikah serta tak henti-hentinya berdo'a dan memberi semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini
8. Teruntuk suami tercinta yang selalu memberi semangat, membiayai kuliahku, yang sering mendo'akan dan yang setia menunggu di kampus untuk bimbingan dan juga untuk saudaraku Rahmatsyah, Sri Rahmayanti, Rahmayunita, Rahmadhani, Arsy Ramadhan serta mertua dan adik ipar

9. Kepada Muhammad Nur S.Sos yang setia membantu dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada pemerintah Desa Taeng dan jajarannya yang meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
10. Teman-teman Jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2016 khususnya Kelas MD.B yang selama ini bersama-sama belajar.
11. Teman – teman KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 61 Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros serta masyarakat setempat yang selama 45 berbagi kehidupan.

Akhirnya, harapan penulis semoga Skripsi ini dapat berguna bagi saudara dan saudariku beserta para pembaca. Semoga pihak yang memberi bantuan dan dorongan maupun motivasi dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Taeng- Gowa, 6 Mei 2020

Penulis,



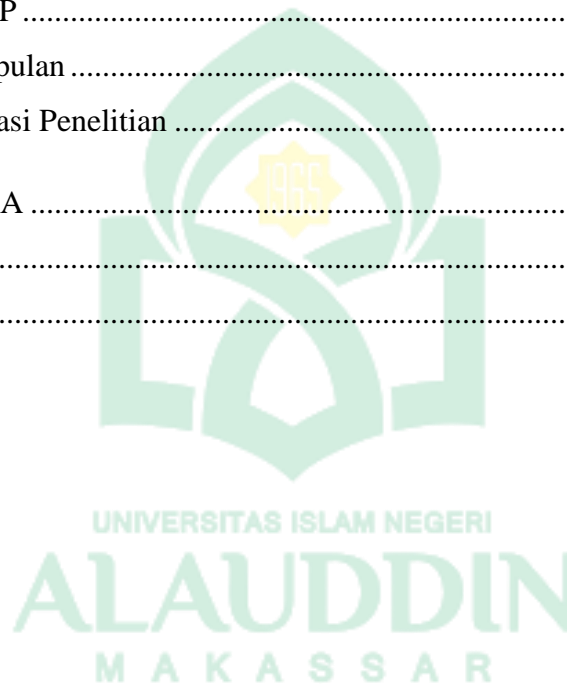
Rahmayani

NIM: 50400116053

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERMOHONAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1-11
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12-44
A. Tinjauan tentang Manajemen Kinerja.....	12
B. Tinjauan Tentang Aparatur Desa.....	22
C. Tinjauan tentang Pembangunan Desa.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45-51
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data	46
D. Metode Pengumpulan Data.....	47
E. Instrument Penelitian	49
F. Teknik Pengenalan dan Analisis Data.	50
G. Keabsahan Data.....	51

BAB IV	HASIL PENELITIAN	52-83
	A. Gambaran Umum Kantor Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.....	52
	B. Manajemen Kinerja Aparatur Desa di Kantor Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.....	68
	C. Pembangunan di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.....	74
BAB V	PENUTUP	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Implikasi Penelitian	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	90
RIWAYAT HIDUP	104



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	kh	Ka dan ha
د	D	D	De
ذ	Z	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	R	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ص	Sy	sy	Es dan ye
ض	S	S	es (dengan titik dibawah)
ط	D	D	de (dengan titik dibawah)

ط	T	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	‘	apostrop terbalik

x
i

غ	G	G	Ge
ف	F	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau di potong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	a	A
	<i>Kasrah</i>	i	I
	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	ai	a dan i
	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif</i> <i>atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*aliflam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-

Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. *rbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz a-ljalalah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bilanama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR).

B. Daftar singkat

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

Swt.	: subhanallah wa ta'ala
Saw.	: sallallahu 'alaihi wa sallam
a.s.	: 'alaihi al-salam
H.	: Hijriah
M.	: Masehi
SM.	: Sebelum Masehi
I.	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W.	: Wafat tahun
QS /	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.Jenis tanah dan luas.....	55
TABEL 4.2.Mata Pencaharian DesaTaeng.....	56
Tabel 4.3.Usia Produktif.....	58
Tabel 4.4.Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
Tabel 4.5.Agama di Desa Taeng.....	59
Tabel 4.6.Tingkat pendidikan.....	61
Tabel 4.7.Sarana Jalan.....	61
Tabel 4.8.Sarana Ibadah.....	63
Tabel 4.9.Sarana sekolah.....	63
Tabel 4.10.Sarana Kesehatan.....	65
Tabel 4.11.Sarana Olah Raga.....	65
Tabel 4.12.Struktur Pemerintahan.....	66
Tabel 4.13.Anggaran Pendapatan Desa.....	75
Tabel 4.14.Anggaran Belanja Desa.....	75-78

ABSTRAK

Nama : Rahmayani
Nim : 50400116053
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Manajemen Kinerja Aparatur Desa dalam Mewujudkan
Pembangunan di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten
Gowa

Pokok permasalahan penelitian ini adalah, bagaimana manajemen kinerja aparatur Desa dalam mewujudkan pembangunan di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen kinerja aparatur Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan bagaimana pembangunan yang ada di Desa Taeng Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan manajemen.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah Nurdin Yasin (kepala desa), Muh Kasim, SH (sekretaris desa), Muhammad Nur S.Sos (kepala seksi kesejahteraan), Rifandi S.Pd (kepala urusan keuangan), Muh. Asyari (kepala seksi pembangunan) dan Fatmawati (ketua Badan Pemerintah Desa). Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengelolaan data yang dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kinerja yang ada di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan efektif. Aparatur desa dalam melaksanakan suatu kegiatan menggunakan perencanaan dan pengawasan yang telah diterapkan dengan baik. Sehingga dalam melaksanakan suatu kegiatan akan menjadi mudah. Pengawasan dan masukan juga dilakukan oleh pemerintah desa terhadap aparatur desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pembangunan yang ada di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sudah bisa dikatakan berhasil. Dengan pembangunan paving blok, pembuatan drainase, pembangunan posyandu, pekerjaan talud, plat duiker, dan pembangunan jamban keluarga yang sangat membantu masyarakat. Kemudian pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di Desa Taeng dengan mengadakan pelatihan dan kader yang bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas masyarakat.

Implikasi dari penelitian ini diharapkan kepada pemerintah desa dan aparatur desa agar dapat mempertahankan yang baik dan yang kurang diperbaiki. Kemudian perlu adanya evaluasi dalam setiap kegiatan agar manajemen kinerja yang ada di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dapat berjalan dengan baik pula.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat yang dinamis dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan menuntut profesionalitas dari aparat pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Aparatur pemerintah desa merupakan alat pemerintah sebagai pelaksana pemerintah terendah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kualitasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Sebagai abdi masyarakat aparat pemerintah desa adalah wakil dari masyarakat. Dengan fungsi gandanya tersebut diharapkan aparat pemerintah desa mampu mewakili masyarakat.

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul nama lain yang dimaksud adalah marga. Dengan demikian desa yang dimaksud marga, yaitu sesuai dengan hak asal usulnya.¹ Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah yang langsung di bawah camat dan merupakan organisasi pertama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian desa menjadi sumber utama dan pertama dari berbagai data dan keterangan yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka dasar penyusunan rencana pembangunan daerah maupun nasional.

¹HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 65-66.

Undang-undang desa lahir untuk memperkuat pemerintahan desa melalui berbagai kewenangan yang diberikan pada desa. Desa yang dimaksud bermakna dua, desa sebagai pemerintahan terkecil dan desa sebagai masyarakat warga. Jantung utama arah pembangunan desa sesuai dengan tujuan dibuatnya undang-undang desa dan memberikan manfaat bagi segenap warga, ditentukan oleh kualitas musyawarah desa dan program-program yang dikembangkan.² Dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu desa atas dasar partisipasi masyarakat desa dalam setiap kegiatan.

Tata pemerintahan desa adalah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu pemerintahan desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Pemerintah desa di bawah pimpinan kepala desa memiliki tugas yaitu: 1). Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efisien dan akuntabel. 2). Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Pemerintah desa menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana, fasilitas umum, dan pembinaan lembaga masyarakat.³ Namun yang terjadi ditingkat pemerintahan terendah yaitu desa atau

² Sri Palupi, Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak, (Lakpesdam PBNU , Jakarta Selatan: 2016), h. 22

³Wahyudi Kumoroditomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 131.

kelurahan justru banyak terjadi kejadian yang menyangkut rendahnya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas. Masyarakat secara umum masih sering mengeluhkan para aparatur pemerintah desa yang kurang pengertian pada kebutuhan warga. Untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja masyarakat sering dihadapkan pada kesulitan, misalnya prosedur yang berbelit-belit. Aparat pemerintah desa kurang merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja.

Dengan demikian, idealnya aparatur pemerintah desa memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat. Kenyataannya aparatur pemerintah desa belum mampu menjalankan fungsi-fungsi dengan baik. Di samping karena kualitas aparturnya, juga karena tidak semua warga masyarakat faham tentang program pemerintahan.

Berhasilnya pembangunan nasional termasuk pembangunan desa, semata-mata ditentukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan tingkat pusat dan implementasi kebijaksanaan tersebut tampak dari berbagai kebijaksanaan di Tingkat Provinsi, Kabupaten Daerah Tingkat II, sampai ke Kecamatan dan Desa. Sisi lain yang berperan, yakni komponen masyarakat dengan tingkat kesadaran akan partisipasi masyarakat, berupa dana, tenaga, dan pikiran yang secara konkret membangun desa. Dalam pola pengembangan desa ditegaskan bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam hal memberikan bimbingan dan Desa memberikan

partisipasinya.⁴ Dengan adanya pembangunan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Seseorang dapat dikatakan miskin jika orang tersebut dengan tingkat pendapatannya tidak memungkinkan untuk mengikuti tata nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat. Di dalam teori sumber kesejahteraan adalah konsumsi. Tidak mungkin seseorang dapat menyadap *utility* tanpa adanya konsumsi. Jika demikian kesejahteraan relatif tiap individu harus diproyeksikan dari tingkat konsumsinya. Secara umum ada beberapa jenis kemiskinan, yaitu (a) kemiskinan alamiah, yaitu yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam, (b) kemiskinan struktural, yaitu yang berhubungan dengan sifat kelangkaan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Kemiskinan juga terjadi karena kurangnya manajemen kinerja dalam setiap individu.

Manajemen kinerja merupakan suatu aktivitas secara menyeluruh dalam hal memantau kinerja pada karyawannya dalam hal hubungan dengan persyaratan kerja dalam jangka waktu tertentu yaitu: tujuan yang ingin dicapai, bimbingan langsung pada tugas, penyimpanan dan akses informasi mengenai kinerja dan selanjutnya akan dibuat suatu penilaian mengenai kinerja tersebut. Penilaian kinerja yang diperoleh ini selanjutnya akan kembali diberikan kepada pegawai yang bersangkutan melalui wawancara penilaian kinerja.

⁴ Tinneke meiske tumbel, *Analisis Bantuan Desa Terhadap Pembangunan Desa*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol. 1 No.2, 2015, h. 1.

Manajemen merupakan salah satu proses yang sangat penting yang mampu menggerakkan suatu organisasi. Tanpa manajemen yang efektif dan efisien tidak akan ada usaha yang berhasil lama. Tercapai tujuan organisasi baik tujuan ekonomi, sosial dan publik untuk sebagian besar bertanggung jawab kepada kemampuan para pelaku dalam melakukan sesuatu hal yang bersangkutan.⁵ Melaksanakan manajemen kinerja akan memberikan manfaat bagi organisasi, lembaga dan individu. Manajemen kinerja mendukung tujuan menyeluruh organisasi dengan mengaitkan pekerjaan dari setiap pekerja dan manajer pada keseluruhan unit kerjanya. Pekerja memainkan peran kunci kinerja bawahan memengaruhi secara langsung kinerja individu, unit kerja, dan seluruh organisasi.

Manajemen kinerja merupakan kebutuhan mutlak bagi organisasi untuk mencapai tujuan dengan mengatur kerjasama secara harmonis dan terintegrasi antara pemimpin dan bawahannya. Manajemen kinerja diawali dengan perumusan dan penetapan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan organisasi dicapai melalui serangkaian kegiatan dengan mengarahkan semua sumber daya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Tujuan yang diharapkan tersebut merupakan titik awal dalam perencanaan kinerja organisasi.

Dengan demikian, Kantor Desa Taeng sebagai suatu organisasi atau lembaga yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat untuk melayani masyarakat setempat. Baik itu di bidang pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan ataupun

⁵Ibrahim Lubis, *Pengertian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*, (Cet, II; Jakarta Timur. Ghalia Indonesia, 1985), h. 22.

pembinaan. Untuk itu, upaya untuk mewujudkan pembangunan desa adalah penerapan manajemen kinerja dengan kualitas yang baik dan ditempatkan pada bidang yang ditekuni, maka upaya manajemen kinerja aparatur desa dalam mewujudkan pembangunan desa kiranya dapat tercapai khususnya pada Kantor Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Dengan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kantor Desa Taeng yang terletak di Kabupaten Gowa merupakan tempat yang strategis untuk melakukan suatu penelitian.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian dimaksud agar pembahasan tidak keluar dari pokok permasalahan. Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian ini pada “manajemen kinerja aparatur desa dalam mewujudkan pembangunan di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”.

2. Deskripsi fokus

Berdasarkan pada fokus penelitian dapat dideskripsikan bahwa, penelitian ini dibatasi pada “manajemen kinerja aparatur desa dalam mewujudkan pembangunan di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kab Gowa”. Maka deskripsi fokus penelitian ini adalah:

a. Manajemen kinerja

Manajemen kinerja adalah kegiatan yang dicapai oleh aparatur desa dalam suatu instansi. Adapun tahapan pencapaian manajemen kinerja yaitu: perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengawasan kinerja dan evaluasi kinerja. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah pada manajemen kinerja aparatur desa di Kantor Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

b. Pembangunan desa pada kantor Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Pembangunan desa adalah suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik.⁶ Pembangunan merupakan aset yang sangat berharga dalam suatu desa karena kesuksesan desa tidak terlepas dilihat dari pembangunan itu sendiri. Adanya pembangunan infrastruktur dalam desa dengan mengikuti RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) yang berlaku selama setahun, serta menggunakan ADD (Anggaran Dana Desa) sehingga pembangunan berlangsung yang telah disepakati pada saat MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) Desa pada Kantor Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa .

⁶Nyoman Beratha , *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, (Jakarta Timur: Ghali Indonesia, 1982), h. 65.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dikemukakan pokok permasalahan yaitu “Manajemen kinerja aparatur Desa dalam mewujudkan pembangunan Desa” untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen kinerja aparatur desa di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana pembangunan desa di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai manajemen kinerja aparatur desa dalam mewujudkan pembangunan desa di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atas dasar berbagai literatur yang menjadi rujukan penulis diantaranya:

Peneliti yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dengan judul skripsi “Penerapan Manajemen Kinerja dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Enrekang” tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan manajemen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen kinerja yang diterapkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang menggunakan (1) manajemen pelayanan publik yang meliputi: pelayanan pendaftaran dan pendataan

penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan penyuluhan dan informasi dan pelayanan administrasi perkantoran (2) manajemen administrasi kependudukan meliputi: pendaftaran penduduk, administrasi pencatatan sipil dan pengelolaan data dan administrasi penduduk. Adapun kualitas kerja pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Enrekang meliputi: kualitas pelayanan publik yang sudah memadai, disiplin kerja yang belum memadai, kompetensi pegawai belum memadai, dan fasilitas kantor juga belum memadai.⁷ Persamaannya yaitu peneliti ini sama-sama menggunakan metode manajemen kinerja sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini meneliti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang.

Peneliti yang dilakukan oleh Murni dengan judul skripsi “Menejemen Kinerja dalam Membangun Sumber Daya Islami pada Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto” tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Sumber Daya Islami, hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Kinerja Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan suatu kegiatan meliputi perencanaan dan penilaian kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pegawai yang selalu disiplin, tepat waktu dalam bekerja. Sehingga para karyawan menjadi antusias terhadap kinerjanya, yang telah dituangkan dalam bentuk SKP yang telah dibuat oleh pegawai yang menduduki jabatan berdasarkan panduan penyusunan SKP yang telah dibuat oleh pemerintah.

⁷Sri Wahyuni, Penerapan Manajemen kinerja dalam meningkatkan kualitas kerja pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, skripsi 2017.

Dari semua hasil tahapan manajemen dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pengembangan karier seseorang pegawai negeri sipil.⁸ Persamaannya yaitu peneliti ini menggunakan metode manajemen kinerja sedangkan perbedaannya yaitu peneliti ini lebih fokus dalam membangun sumber daya Islami pada Pegawai Kementrian Agama Kabupaten Jeneponto.

E. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui manajemen kinerja aparatur desa di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ?
- b. Untuk mengetahui pembangunan desa di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ?

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoretis

- 1) Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambahkan wawasan bagi peneliti dan dapat dijadikan referensi bagi yang lain.

⁸Murni, manajemen kinerja dalam membangun sumber daya islami pada pegawai kementrian Agama Kabupaten Jeneponto, Skripsi 2019 .

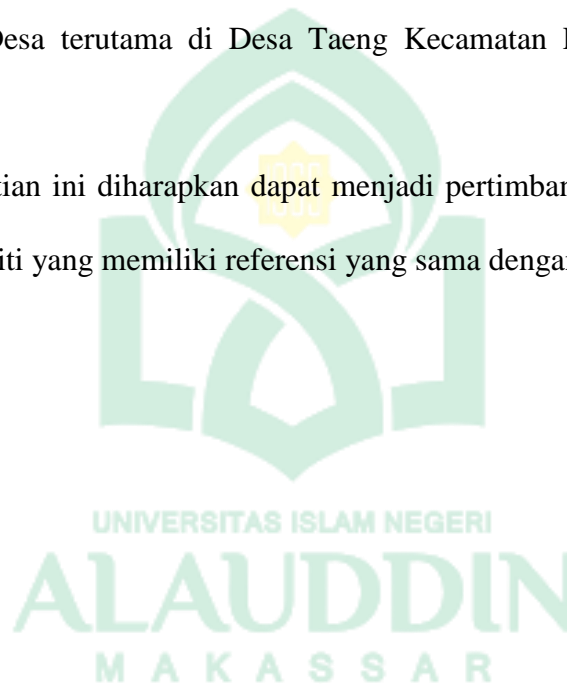
2) Sebagai tambahan pengetahuan tentang manajemen kinerja aparatur Desa dalam mewujudkan pembangunan.

3) Sebagai tambahan pengetahuan manajemen kinerja dalam perspektif Islam dan pembangunan dalam perspektif Islam.

b. Kegunaan praktis

1) Dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam Manajemen Kinerja Aparatur Desa terutama di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan ataupun rujukan untuk peneliti-peneliti yang memiliki referensi yang sama dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan tentang Manajemen Kinerja

1. Pengertian manajemen

Pengertian manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, “*management*” yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individual atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.⁹ Manajemen juga dapat dikatakan sebagai suatu hal yang paling penting dalam kehidupan ini karena tanpa adanya manajemen maka semua kegiatan yang akan dilakukan tidak akan berjalan dengan baik.

Richard L. Daft berpendapat bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi. Manajemen adalah salah satu ilmu yang dapat diterapkan dalam perusahaan untuk memecahkan persoalan-persoalan guna untuk mengambil keputusan oleh pimpinan atau manajer.¹⁰

⁹ Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 9.

¹⁰ Richard L. Daft, *Manajemen* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 6-7.

M. Manullang mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan.¹¹ Dari pengertian menurut para ahli tentang manajemen terdapat dalam QS. As-Sajadah/32:5.

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Terjemahnya:

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”.¹²

Dari ayat diatas kata Dia maha kuasa itu senantiasa mengatur dengan sangat baik, semua urusan ciptaan-Nya dari langit yakni tempat yang amat tinggi ke bumi, kemudian ia adalah seribu tahun menurut perhitungan kamu. Itu Dia-lah Tuhan yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Kata *yudabbir* terambil dari akar kata *dubur* yang berarti belakang yakni kesudahan, dampak atau akibatnya telah diperhitungkan dengan matang, sehingga hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki. Yang dimaksud dengan *al-amrurusan* adalah kondisi sesuatu serta sifat dan ciri-cirinya sekaligus sistem yang mengaturnya.

Ibn ‘Asyur memahami firman-Nya di atas dalam arti semua pengaturan makhluk dari langit sampai ke bumi sejak masa penciptaan langit dan bumi itu serta apa yang terdapat antara keduanya, masing-masing berada dengan mantap sebagaimana pengaturan Allah atasnya. Yang lenyap atau yang tinggal sampai

¹¹M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 15.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 416.

hancurnya langit dan bumi semuanya pada akhirnya terhimpun dan kembali kepada Allah dengan cara kembali dan kesudahan akhir yang sesuai dengan ciri dan sifat-sifatnya masing-masing sebagaimana dikehendaki oleh Allah melalui pengaturannya. Kesudahan itulah yang dimaksud dengan *ya 'ruju ilaihi/ naik kepada-Nya*.¹³

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt adalah pengatur alam (*Al Mudabbir/manager*). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah Swt alam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah Swt telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-bainya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.¹⁴ Dari definisi di atas tentang manajemen, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah seni atau proses dalam mencapai tujuan dengan cara perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.

2. Fungsi manajemen:

Pendistribusian fungsi yang dimaksud meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengawasan.

a. Perencanaan (*planning*)

Aktivitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan kemudian setiap manajer dituntut terlebih dahulu agar mereka membuat rencana tentang aktivitas yang harus dilakukan. Perencanaan tersebut

¹³ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 181.

¹⁴Rahmat Hidayat dan H. Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Manajemen Pendidikan Islam*, (Medan: LPPPI, 2007), h. 6.

merupakan aktivitas untuk memilih dan menghubungkan fakta serta aktivitas membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktivitas yang direncanakan. Tujuan dari setiap organisasi dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan inilah yang menjadi pegangan dalam aktivitas selanjutnya. Tujuan yang ingin direalisasikan tersebut harus tetap diperhatikan, dipedomani, dan dijadikan bacaan oleh setiap elemen organisasi, khususnya manajer yang memegang kemudi organisasi.¹⁵ Dengan adanya perencanaan yang matang maka pekerjaan yang akan kita lakukan akan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian sebagai fungsi manajemen yang kedua adalah organisasi, baik dalam arti statis maupun dinamis. Organisasi dalam arti statis adalah skema, bentuk, bagan yang menunjukkan hubungan di antara fungsi serta otoritas dan tanggung jawab yang berhubungan satu sama lain dari individu yang diberi tugas atau tanggung jawab atas setiap fungsi yang bersangkutan. Sedangkan organisasi dalam arti dinamis adalah proses pendistribusian pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok dengan otoritas yang diperlukan untuk pengoperasiannya. Dengan demikian, kewajiban yang dijalankan memberikan saluran yang efektif bagi setiap aktivitas yang dilaksanakan. Jadi, pengorganisasian berarti menetapkan sistem organisasi yang dianut organisasi dan mengadakan distribusi kerja agar mempermudah perealisasi tujuan.

¹⁵ H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 24.

c. Pengarahan (*directing*)

Directing merupakan pengarahan yang diberikan kepada bawahan sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. *Directing* juga mencakup kegiatan yang dirancang untuk memberi orientasi kepada pegawai, seperti misalnya menyediakan informasi tentang hubungan antar bagian, antar pribadi dan tentang sejarah, kebijaksanaan dan tujuan dari perusahaan.¹⁶

d. Pemotivasian (*motivating*)

Agar tercipta keadaan kerja yang menggairahkan, manajer harus melaksanakan fungsinya, memotivasi bawahannya. Motivasi dimaksudkan setiap perasaan, kehendak, atau keinginan yang sangat memengaruhi kemauan individu. Dengan demikian, individu tersebut didorong berperilaku dan bertindak mencapai tujuan.¹⁷

e. Pengawasan (*controlling*)

Pengendalian dalam *Kamus Bahasa Indonesia* berarti proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.¹⁸

¹⁶George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara), h. 18.

¹⁷ H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, h.25.

¹⁸Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), h. 543.

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.¹⁹

Penerapan fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengawasan dengan baik maka kegiatan yang akan kita lakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan.

3. Pengertian Kinerja

Menurut kamus bahasa Indonesia kerja adalah melakukan sesuatu, sesuatu yang dilakukan. Sedangkan konsep kinerja merupakan singkatan dari *kinetika energi kerja* yang sinonimnya dalam bahasa Inggris *performance*. Istilah *performance* sering di indonesiakan sebagai *performa*. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh indikator-indikator suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu.²⁰ Kinerja berasal dari *performance* ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung.

Amstrong dan Baron mengemukakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian,

¹⁹George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 18.

²⁰Lebas, M, *Performance Measurement and performance*, (International Journal of Production Economics, 1995), h. 1-3.

kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut, kinerja adalah tentang *apa* yang dikerjakan dan *bagaimana* cara mengerjakannya.²¹

Sudarmanto mengemukakan dalam berbagai literatur, pengertian tentang kinerja sangat beragam. Akan tetapi, dari berbagai perbedaan pengetahuan, dapat dikategorikan dalam dua pengertian yaitu:

- a. Kinerja merujuk pengertian sebagai hasil yang diproduksi atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas selama periode waktu tertentu.
- b. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi tempat orang bekerja

Terkait dengan konsep kinerja, ada 3 level kinerja yaitu:

- 1) Kinerja organisasi: merupakan pencapaian hasil (*out come*) analisis organisasi. Kinerja pada level ini terkait dengan tujuan, rancangan dan manajemen organisasi.
- 2) Kinerja proses: merupakan kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk dan layanan.
- 3) Kinerja individu: merupakan pencapaian atau efektifitas tingkat pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan rancangan dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu.

²¹ Wibowo, *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 7.

4. Pengertian manajemen kinerja

Manajemen kinerja adalah manajemen tentang menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif, manajemen kinerja memfokuskan pada apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan pekerja untuk berhasil. Manajemen kinerja adalah tentang bagaimana kinerja dikelola untuk memperoleh sukses.

Pemahaman tentang manajemen kinerja di atas, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya manajemen kinerja adalah proses kinerja yang diperoleh. Dasar untuk melaksanakan manajemen kinerja adalah perumusan tujuan, pendapat *consensus* dan kerjasama, yang terjadi komunikasi dua arah, serta terdapat umpan balik. Fungsi dari manajemen kinerja adalah mendukung secara keseluruhan dari sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut.

J. Thomas Alweni mengemukakan bahwa manajemen kinerja adalah suatu proses hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²² Dengan demikian, manajemen kinerja merupakan proses pengelolaan kinerja dalam memberikan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya.

5. Manajemen kinerja dalam perspektif Islam

Tujuan manajemen kinerja Islam termasuk beruntung karena semua pedoman dan panduan sudah terkodifikasi, kini tinggal bagaimana kita menterjemahkan dan

²²J. Thomas Alweni, *Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja seri Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bhuana Ilmun Computer, 2002), h. 22.

mengapresiasikannya dalam kegiatan harian, mingguan dan bulanan. Jika kita pandang dari sudut bahwa tujuan hidup itu mencari ridha Allah Swt maka apapun yang dikerjakan, apakah di rumah, di kantor takkan lepas dari kerangka tersebut.

Artinya, setiap pekerjaan yang kita lakukan, dilaksanakan dengan sadar dalam rangka pencapaian ridha Allah. Cara melihat seperti ini akan memberikan dampak. Misalnya, dalam kesungguhan mendapat pekerjaan. Jika seseorang sudah meyakini bahwa Allah Swt sebagai tujuan akhir hidupnya maka apa yang dilakukan di dunia tidak dijalankan dengan sembarangan. Ia akan mencari kesempurnaan dalam mendekati kepada Al-Haq. Terdapat dalam QS. Al-Ahqaf/46 : 19 tentang manajemen kinerja.

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ تَمَّا عَمِلُوا وَلِيُوقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan”.²³

Dari ayat di atas yang mengatakan “Dan bagi masing-masing mereka yang taat dan durhaka itu akan memperoleh derajat-derajat yakni peringkat-peringkat yang berbeda-beda di surga atau di neraka sesuai apa yang telah mereka kerjakan agar menjadi jelas buat semua keadilan Allah dan agar Allah memenuhi bagi mereka balasan amal-amal mereka, sedang dalam saat yang sama mereka sedikit pun tidak dirugikan bahkan yang taat diberi ganjaran yang berlipat ganda.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 727.

Selanjutnya kepada semua pihak diingatkan tentang apa yang akan dialami di hari kiamat. Allah bagaikan berfirman: Ingatkanlah tentang apa yang akan dihadapi pada hari kemudian nanti dan ingatkan juga tentang hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka sehingga mereka merasakan kepanasannya.²⁴ Dari ayat tersebut bahwa Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dan menunjukkan kinerja yang baik maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya serta memberikan keuntungan bagi lembaga tempat ia bekerja.

Maka kita dapat mengambil pembelajaran dari ayat di atas bahwa setiap manusia yang bekerja akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya, setiap Allah Swt akan menaikkan derajat bagi mereka yang bekerja.

Beberapa syarat manajemen kinerja Islam, antara lain:

- a. Kerja adalah aktifitas amal dalam islam
- b. Seorang muslim hendaknya berorientasi pada pencapaian hasil
- c. Memiliki karakter Al-Qawwiyy yang merujuk kepada *reliability*, dapat diandalkan, juga berarti memiliki kekuatan fisik dan mental. Kemudian Al-Amiin merujuk pada *integrity* perbuatan yang jujur dan dapat memegang amanah.
- d. Kerja keras

²⁴M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 95-96.

e. Kerja dengan cerdas, dimaknai dengan semangat maka kinerja seorang muslim bersumber dari visinya: meraih *hasanah fi dunya* dan *hasanah fi al-akhirath*. Kerja dengan cerdas maksudnya adalah bekerja dengan baik, sungguh-sungguh dan mencapai suatu keberhasilan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁵ Sebagai umat muslim marilah kita banyak-banyak bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh sang pencipta terkait kapasitas dasar manajerial yang harus diterapkan sebaik mungkin.

B. Tinjauan tentang Aparatur Pemerintah Desa

1. Pengertian Aparatur Pemerintah Desa

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai perintah dan pemerintahan, yang keduanya ada hubungan. Setelah ditambah awalan “pe-” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Di beberapa negara antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan. Misalnya, Inggris menyebutkan “*Government*” Prancis menyebutkan “*Gouvernement*” keduanya berasal dari perkataan latin “*Gubernaculum*” yang biasa sekarang kita sebut dengan “*Gubernur*”. Dalam bahasa Arab disebut dengan “*Hukumat*” di Amerika Serikat disebut dengan “*Administration*”, sedangkan “*Regering*” sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijakan

²⁵<http://mahasiswa.teller.blogspot.com/2016/03/makalah-manajemen-kinerja-islam.html?m=1> diakses pada tanggal 1 februari 2020 pkl. 14:02 Wita.

dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah. Jadi, “*Regeren*” digunakan untuk pemerintahan pada tingkat nasional, sedangkan “*Bestuur*” diartikan sebagai keseluruhan badan usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Untuk menilai ilmu pengetahuan seorang aparat birokrat pemerintahan harus dipertanyakan intelektualnya, baik *IntelligenceQuestion* maupun *Intelligence Quotient*. Akal dan intelektualitas seorang birokrat pemerintahan, hendaknya dipergunakan dengan mengoperasionalkan otaknya untuk berfikir, berusaha mencari kebenaran sesuai dengan kemampuan ilmu pengetahuan masing-masing. Hal ini akan menimbulkan logika yang menjadikan aparat pemerintahan tersebut seorang intelektual (pada puncak kepakaran akan dikenal sebagai manusia yang ilmunan pemerintahan) karena dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah dalam ilmu pemerintahan secara tepat.²⁶ Menjadi pemerintah tidaklah mudah, agar dapat tercapai pemerintahan yang intelektual. Pemerintah harus memberlakukan karakteristik dasarnya yaitu: tegaknya hukum, partisipasi aktif, responsif, keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, transparansi, efektif dan ekonomis, berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah desa bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan yang dimandatkan kepadanya dalam undang-undang desa, dengan mengajak,

²⁶ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220) h.13.

melibatkan, dan memastikan masyarakat desa turut berpartisipasi. Sementara tugas utama warga masyarakat desa adalah melibatkan diri dalam sebuah proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan.²⁷ Proses pembangunan desa yang diawali dengan musyawarah di tingkat desa. Undang-undang desa menyebut musyawarah di tingkat desa ini sebagai musyawarah desa.

Keberhasilan pemerintah desa ditandai dengan keberhasilan para penyelenggara pemerintah desa termasuk aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tanggungjawabnya.²⁸ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aparatur atau aparat adalah keseluruhan pejabat negara yang bekerja pada instansi pemerintah. Di dalam menjalankan peran dan fungsi pemerintah desa, kehadiran aparatur desa di dalam masyarakat dimaksudkan untuk menumbuhkan gairah, prakarsa serta gagasan baru dalam rangka memperbaiki kehidupan desanya.

Ada kecenderungan aparat pemerintah desa dalam mempertahankan status quo berarti mempertahankan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan sebelumnya., sehingga menimbulkan persepsi masyarakat bahwa berhubungan dengan pemerintah desa (birokrasi) berarti berhadapan dengan proses yang berbelit-belit disamping itu prosedur yang sulit ditumpangi oleh kepentingan pribadi dan dijadikan komoditas yang diperdagangkan untuk kepentingan pribadi atau

²⁷ Sri Palupi, Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak, (Lakpesdam PBNU , Jakarta : 2016), h. 43

²⁸<https://media.neliti.com/media/publications/1094-ID-pentingnya-kualitas-aparat-pemerintah-desa-dalam-pembangunan-di-desa-lantung-kec.pdf> ,diakses pada tanggal 15 Juli 2020 Pkl. 20:01 Wita.

kelompok.²⁹ Oleh karena itu, aparat pemerintah desa dapat dikatakan berkualitas apabila telah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik, dan dapat melayani masyarakat sesuai kebutuhannya.

Istilah pemerintah dalam arti organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit:

a. Pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus pada kekuasaan eksekutif.

1. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri;

2. Menurut UUD 1950, pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden bersama-sama dengan menteri-menteri;

3. Menurut Konstitusi RIS 1949, pemerintah ialah Presiden bersama menteri-menteri.

b. Pemerintah dalam arti luas ialah semua organ negara termasuk DPR. Bentuk kerjaan yang terkenal yaitu Republik (berasal dari bahasa Latin: *res publica* = kepentingan umum) ialah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu. Biasanya presiden dapat dipilih kembali setelah habis masa jabatannya.³⁰ Pemerintah adalah alat-alat atau organ-organ yang menjalankan tugas

²⁹Wahyudi Komoroditomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 131.

³⁰Kansil dan Christine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220) h. 17-18.

dan kewajiban dalam pemerintahan sesuai dengan peraturan yang ditentukan demi tercapainya suatu tujuan.

2. Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa

Aparatur pemerintah desa bertugas membantu kepala desa, aparatur pemerintah desa terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing bertugas sebagai berikut:

- a. Unsur staf memberikan pelayanan administrasi.
- b. Unsur pelaksana merupakan pelaksana teknis di lapangan.
- c. Unsur wilayah membantu kepala desa di wilayah bagian desa yang disebut kepala lingkungan.

Jumlah dan susunan staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah tersebut di atas disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.³¹

Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (SOTK) mulai dari pasal 6 sampai pasal 10 disebutkan bahwa, kepala desa dan perangkat desa mempunyai tugas dan fungsi yang diantaranya sebagai berikut:

Pasal 6 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa berbunyi:

1. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

³¹Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, 1991), h. 24.

2. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahanm pembinaan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya , ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa yang berbunyi:

- a. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa.
- b. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam membantu administrasi pemerintahan.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Sekretaris desa mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventrisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Kaur) bidang Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan perencanaan berbunyi:

- a. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris kepala
- b. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- c. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat

desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9 menjelaskan tentang tugas dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan berbunyi:

- a. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- b. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- c. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
 1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas

sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 10 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Kewilayahan / Kepala Dusun (Kadus) berbunyi:

a. Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah.

b. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Wilayah memiliki fungsi:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.³² Itulah pemaparan tentang Tugas dan Fungsi dari pada Kepala Desa dan perangkat desa sesuai isi dari

³²www.rensingbat.desa.id, diakses tanggal 14 januari 2020 pk. 19.50 Wita.

permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK yang disesuaikan dengan peraturan pemerintahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dan perangkat desa wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan maupun dengan tugas pokoknya masing-masing.

Dengan adanya stuktur dan fungsi pemerintahan desa diharapkan mampu memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Sehingga terdapat koordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Artinya bahwa aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan kerjasama. Para aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan dikontrol oleh lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa maupun oleh masyarakat setempat.

Manusia merupakan unsur dinamis dalam bertindak/berfungsi sebagai subyek penggerak roda dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah di pemerintahan daerah faktor utama adalah manusia. Manusia sebagai pelaksana pemerintahan dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok masing-masing, adapun komponen tersebut adalah:

- a. Pemerintahan daerah terdiri kepala daerah
- b. Alat-alat pelengkap terdiri dari aparatur

c. Rakyat biasa.³³

Dari beberapa komponen diatas dapat dijelaskan bahwa komponen sangat penting dalam mewujudkan pemerintah daerah yang kuat dan efektif dalam pengemban tugas pemerintahan. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah lokal sesuai dengankeinginan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pemerintahan di masa yang mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dilihat dari sisi perbaikan kualitas aparatur pemerintah yang harus dimulai dari sejak rekrutmen dengan menggunakan suatu sistem yang benar-benar menjamin diperolehnya sumber daya yang memang mempunyai kualitas dasar yang baik, pembinaan melalui penugasan yang mendidik, pengembangan program pelatihan yang memungkinkan tersedianya tenaga-tenaga siap pakai, peningkatan kesejahteraan yang memadai, dan pemberian jaminan hari tua secara nyata.

Mengingat besarnya tugas pemerintah daerah maka kualitas sumber daya manusia di Indonesia terutama birokrasi di daerah harus ditingkatkan, karena saat ini kita sudah cukup tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Daerah-daerah yang saat ini berjuang membutuhkan sumber

³³Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, h. 24.

daya manusia yang bisa diandalkan sebagai organisasi pemerintahan sekaligus instrumen pemerintahan daerah sebagai lembaga pelayanan masyarakat. Sementara itu, kendala birokrasi masih cukup sulit untuk dihilangkan seperti, kesadaran anggota birokrasi pada tugas pelayanan, tumpang tindihnya tugas dan fungsi serta rendahnya produktifitas.

Pengertian manajemen kinerja dan pemerintah desa dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya unsur-unsur manajemen dalam suatu pemerintahan, maka segala kegiatan yang ada tidak akan berjalan dengan baik.

C. Tinjauan tentang Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan adalah upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah bagi warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik. Pada umumnya, aspirasi yang paling humanistik tersebut dinyatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara filosofi pendefinisian tersebut dapat diterima, tetapi yang jelas defenisi tersebut kurang operasional, sedangkan pada umumnya para ahli pengembangan wilayah ingin mencari tolak ukur kapan pembangunan itu telah terjadi. Jadi secara filosofis diakui bahwa setiap individu memiliki aspirasi yang dinamis. Satu tujuan tercapai muncul aspirasi yang lain. Peningkatan pendidikan, pendapatan akan menimbulkan aspirasi yang lain, dan ini semua adalah pembangunan. secara umum tujuan pembangunan adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera

lahir batin, sebagai landasan bagi stahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil makmur. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan seirama dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait, dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya.³⁴ Pembangunan juga sangat berpengaruh dengan kemajuan suatu desa dan kemakmuran masyarakatnya.

Untuk mencapai kemajuan kemandirian, dan kesejahteraan seperti yang diinginkan, kegiatan ekonomi harus berkembang dengan cepat. Sehubungan dengan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi harus diproyeksikan cukup tinggi, rata-rata 7% tiap tahun. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut maka sektor industri harus berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian. Selain itu sektor industri juga diandalkan sebagai penyerao utama lapangan kerja yang produktif yang secara bertahap harus dapat menggantikan peranan sektor pertanian. Sektor industri diharapkan tumbuh rata-rata di atas 9% pertahun. Keterkaitan sektor industri dan sektor pertanian ditingkatkan dengan makin mengembangkan agroindustri dan agrobisnis. Demikian pula keterkaitan industri dengan sektor yang mengelola sumber daya alam lainnya seperti pertambangan harus memperoleh perhatian, sehingga struktur industri menjadi lebih kukuh.³⁵

³⁴ Ali Kabul Mahi, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Jl. Kebayun: KENCANA, 2017), h. 29.

³⁵ Ali Kabul Mahi, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, , h. 29.

Mulianto dalam Ibnu Syamsi menjelaskan pembangunan masyarakat desa menghendaki kesadaran dan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat di dalam proses input sebagai artikulator dan aspirasi yang timbul dan hidup di dalam masyarakat dan ikut serta menentukan arah pembangunan.³⁶ Sebab kegiatan pembangunan harus dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang ada di desa.

Kegiatan pembangunan secara terpadu, efisiensi, dan berkelanjutan akan dapat diwujudkan bila terdapat arah dan pentahapan pembangunan yang jelas. Bila keputusan untuk melakukan produksi, barang dan jasa berada di tangan individu kebanyakan akan menghasilkan pembangunan menjadi tidak terarah karena kepentingan pribadi akan sangat menentukan. Sedangkan kepentingan pribadi tersebut sering kali tidak sejalan dengan kepentingan umum dan upaya-upaya pemerintah untuk mendorong proses pembangunan. Hal ini tidak hanya terjadi pada kalangan swasta dan masyarakat tetapi juga di kalangan aparatur pemerintahan yang mungkin dalam bentuk ego sektoral.

Kondisi ini akan menjadi lebih rumit lagi mengingat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi dan pembangunan di negara berkembang umumnya masih rendah. Dalam situasi demikian, perencanaan pembangunan menjadi sangat penting guna dapat mengarahkan aktivitas para pelaku pembangunan,

³⁶Tinneke meiske tumbel, *Analisis Bantuan Desa Terhadap Pembangunan Desa*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol. 1 No.2, 2015, h. 1.

baik pemerintah, swasta, dan masyarakat umum dalam rangka menuju pada suatu sasaran yang jelas dan bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai pendorong proses pembangunan (*Agent of Development*) dalam masyarakat.³⁷

2. Undang-undang tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (UU Desa) mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah di desa (RPJM Desa) dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) kepada pemerintah desa. RPJM desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP desa sebagai penjabaran dari RPJM desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM desa dan RKP desa merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Topik pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan diatur pada BAB IX UU Desa yang berisi 7 pasal (pasal 79 s/d pasal 86). Pasal 78 UU desa menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi

³⁷Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 24.

tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengaruh keutamaan perdamaian dan keadilan sosial.³⁸ Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pembangunan desa itu harus terencana, terkoordinasi, batas waktu, dan sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan.

Tujuan pengaturan desa berdasarkan Pasal UU Desa antara lain:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

³⁸Djuni Pristiyanto, *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, (Jakarta Selatan: YAYASAN PENABULU, 2015), h. 1.

- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.³⁹

3. Tujuan Pembangunan Desa

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penganggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan, potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, UU desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “desa membangun” dan “membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Pembangunan desa dilaksanakannya oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.⁴⁰ Pembangunan

³⁹Djuni Pristiyanto, *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, h. 10

⁴⁰Djuni Pristiyanto, *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, h. 10-11.

desa dilakukan pada wilayah desa itu sendiri, secara singkat disebut pembangunan desa, maupun antar wilayah desa yang berdekatan atau disebut pembangunan kawasan pedesaan.

4. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Melalui peran dan kemampuan camat, kepala-kepala desa dan partisipasi masyarakat, maka pembangunan desa akan maju. Hal-hal yang bersifat peran pemerintah dalam inisiatif dan memajukan perekonomian adalah berkaitan dengan lingkungan sosial, perkembangan ekonomi, keadaan politik, tersedianya kemampuan manajemen, efisiensi administrasi pembangunan. Elmen ini merupakan kegiatan yang mengandung harapan hasil yang paling efektif sekaligus tidak terkecuali menjadi sasaran bagi pembangunan sebagai bantuan utama bagi masyarakat pedesaan.⁴¹ Tujuan utama bantuan desa ini selain melakukan pembangunan fisik secara riil di desa-desa, aspek penting lainnya adalah merangsang swadaya gotong royong dan aktivitas masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa dalam wujud (uang), tenaga kerja, dan pikiran agar masyarakat desa memiliki kreatifitas, inisiatif, dan inovasi.

Kepala desa mengkoordinir setiap kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Pelaksanaan pembangunan

⁴¹Tinneke meiske tumbel, *Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa*, h. 4.

desa yang berskala lokal dapat dikelola secara swakelola desa, kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga. Kepala desa berwenang mengkoordinasi persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkannya APBD (Anggaran Pembangunan Desa). Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program sektor atau program daerah harus diintegrasikan ke dalam pembangunan desa, dimana program sektor atau program daerah di desa tersebut dicatat dalam APBD (Anggaran Pembangunan Desa)

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pelaksanaan program sektor dan program daerah didelegasikan kepada desa, maka desa memiliki kewenangan untuk mengurus seluruh prosesnya. Pelaksanaan program sektor dan program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa tidak menyepakati prosedur teknis pelaksanaan program sektor atau program daerah, Kepala Desa berhak mengajukan keberatan yang disertai dengan dasar pertimbangan keberatan tersebut kepada Bupati/Walikota.⁴² Kepala Desa memiliki mandat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada desa. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat desa dan unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁴²Djuni Pristiyanto, *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, h. 35.

5. Pembangunan dalam perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi bersifat material dan spiritual, yang mencakup pula pembangunan sumber daya manusia, sosial, kebudayaan dan lainnya. Dalam perkataan lain dampak pembangunan dalam Islam adalah menyeluruh sebagaimana konsep Islam sebagai agama yang menyeluruh. Bukan hanya ekonomi yang bersifat material tetapi juga pembangunan nonmaterial yang bersifat spiritual, akhlak, sosial dan kebudayaan.

Ada lima kebijakan utama pembangunan dalam Islam, yaitu pertama konsep pembangunan berlandaskan tauhid dan tazkiyah. Kedua aspek pembangunan meliputi fisik dan moral spiritual, ketiga fokus utama pembangunan adalah manusia sebagai subjek dan objek pembangunan guna mencapai kesejahteraan, keempat fungsi dan peran negara dan kelima adalah skala waktu pembangunan meliputi dunia dan akhirat.

Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah Swt. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus khalifatullah fil ardh (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi. Kedua tugas ini berjaya baik dan sukses sangat tergantung pada jalan yang dipilihannya. Pilihan atas jalan tersebut mempengaruhi arah dari pembangunan. Allah telah memberikan dua potensi pada

diri manusia dalam menentukan arah kehidupan, yaitu potensi kebaikan (al-taqwa) dan potensi keburukan (al-fujur).⁴³ Terdapat dalam QS. Asy-syams/91:8-10).

فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Terjemahnya:

“Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”.⁴⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebenarnya manusia diciptakan Allah memiliki potensi yang besar guna meraih kebajikan, yaitu dengan pengilhaman kebajikan pada dirinya. Potensi tersebut mengantar manusia kepada kebahagiaan hidup, selama hal itu tidak dipendamnya. Dengan demikian, kedurhakaan yang terjadi semata-mata adalah karena ulah manusia sendiri. Dia telah diberi potensi sehingga dapat mengetahui yang baik dan yang buruk, dia diberi kecenderungan untuk melakukan yang baik dengan adanya potensi positif itu, tetapi dia sendiri juga yang memendam potensi itu sehingga dia terjerumus dalam kedurhakaan.⁴⁵

Tazkiyah merupakan upaya untuk mentransformasikan kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Kerangka tazkiyah didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah Swt. Konsep tazkiyah mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal

⁴³ <https://aceh.tribunnews.com/amp/2016/11/04/pembangunan-dalam-perspektif-islam?page=1>, diakses pada tanggal 20 januari 2020 pkl. 10:10 Wita.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 596.

⁴⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 301.

yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek moral spiritual. Ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya didasarkan pada ukuran material, namun juga ditentukan oleh kualitas moral pelaku pembangunan. Sangat menentukan kualitas sumber daya manusia pelaku pembangunan pun sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara. Karena itu pembangunan sumber daya manusia sangat diperlukan, apalagi esensi kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Di sinilah letak fungsi dan peran negara, di mana pemerintah sebagai manajer dan pelayan. Pembangunan harus mampu memetakan semua potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk dikelola dengan maksimal, guna menciptakan kesejahteraan masyarakat di dunia tanpa mengorbankan kehidupan akhirat pelaku pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi dalam pespektif Islam tidak sekedar terkait dengan peningkatan volume barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan dunia dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kualitas kehidupan beragama, sistem jaminan sosial dan kemasyarakatan. Jika memacu pembangunan ekonomi saja, maka akan tercerabutnya nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, akan lahir pelaku pembangunan yang korup dan masyarakat yang materialistik. Semua sisi

kehidupan dinilai dengan uang dan uang menjadi alat ukur kesejahteraan.⁴⁶ Oleh karena itu, sebagai umat muslim yang baik diharuskan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam hal apapun itu demi kehidupan dunia dan juga akhirat kelak. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara dan akhiratlah kehidupan yang sesungguhnya.



⁴⁶<https://aceh.tribunnews.com/amp/2016/11/04/pembangunan-dalam-perspektif-islam?page=1>, diakses pada tanggal 20 januari 2020 pk1. 10:10 Wita.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan yang terdapat dalam penelitian dan dari sudut filsafat metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian.⁴⁷

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang melihat objek penelitian sebagai kesatuan yang terintegrasi, yang penilaiannya kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu mengkaji objek yang mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada serta kontekstual melalui pengumpulan data yang diperoleh.⁴⁸ Penggunaan studi kasus deskriptif dalam penelitian ini juga bermaksud agar dapat mengungkap atau memperoleh informasi dari data penelitian secara menyeluruh.

2. Lokasi penelitian.

Adapun yang menjadi lokasi/tempat penelitian yaitu di Jalan Pelita Taeng Kantor Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

⁴⁷Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Krta Karya, 1998), h.6.

⁴⁸Emzir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2013), h.28.

B. Pendekatan penelitian

Merujuk pada pendekatan yang digunakan penulis ialah jenis penelitian kualitatif yang tidak menggunakan teori sebagai alat yang hendak diuji. Maka teori dalam hal ini berfungsi sebagai hal pendekatan untuk memahami lebih dini konsep ilmiah yang relevan dengan fokus permasalahan. Dengan demikian, penulis menggunakan pendekatan sumber daya manusia terutama terkait dengan manajemen kinerja yang dianggap bisa membantu dalam mengungkap dan menjelaskan dalam rangka penyelesaian permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

C. Sumber data

Sumber data yaitu sumber data yang diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber utama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi kesejahteraan, kepala urusan keuangan, kepala seksi pembangunan dan ketua BPD (Badan Pemerintah Desa) di kantor Desa Taeng.

Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan. Mengenai manajemen kinerja aparatur desa dalam mewujudkan pembangunan di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Peneliti telah mewawancarai sebanyak 6 informan yaitu: Nurdin Yasin (kepala Desa), Muh Kasim, SH (sekretaris desa), Muhammad Nur S.Sos (Kepala Seksi

Kesejahteraan), Rifandi S.Pd (Kepala Urusan Keuangan), Muh. Asyari (Kepala Seksi Pembangunan) dan Fatmawati (Ketua Badan Pemerintah Desa).

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari orang dan instansi.⁴⁹ Sumber data sekunder juga adalah data pelengkap atau tambahan yang melengkapi data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah kajian terhadap artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini serta kajian pustaka dari hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku.

D. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan bahan baku informasi yang sangat penting dalam melakukan penelitian, oleh karenanya dalam melakukan pengumpulan data, riset harus menggunakan teknik-teknik yang tepat. Sebab jika pengumpulan data dilakukan dengan cara yang salah maka akan mengakibatkan informasi menjadi salah sehingga hasil penelitianpun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya data diolah sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih mudah untuk diinterpretasikan dan dianalisis lebih lanjut.⁵⁰

⁴⁹Syamsuddin AB, *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial* (Ponorogo:Wade Group, 2017), h. 101.

⁵⁰Syamsuddin AB, *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial* (Ponorogo:Wade Group, 2017), h.101.

Sebagai seorang peneliti harus melakukan pengumpulan data, kegiatan pengumpulan data merupakan prosedur yang sangat menentukan baik tidaknya suatu penelitian. Metode pengumpulan data adalah tehnik atau cara-cara yang dapat digunakan riset untuk anda.⁵¹

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati dan mencatat perilaku dan pembicaraan subyek peneliti dengan menggunakan pedoman observasi.⁵²

Peneliti menggunakan tehnik ini untuk mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan. Pada observasi ini peneliti akan menggunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang efektif mengenai manajemen kinerja aparatur Desa dalam meningkatkan kualitas kerja di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban

⁵¹Racmat Kriyanto, *Tekhnik Praktis Riset Komunikasi*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2009), h. 9.

⁵²Syamsuddin AB, *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial* (Ponorogo: Wade Grop, 2017), h. 102.

informan dicatat atau direkam. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁵³

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam yaitu dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data yang lengkap dan mendalam.⁵⁴ Sehingga peneliti dengan mudah mendapatkan informasi oleh informan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁵⁵

Dokumentasi yaitu data-data pendukung lain melalui dokumen-dokumen penting seperti dokumen kantor dan juga merupakan suatu cara digunakan untuk menyimpan foto serta sumber tertulis lain yang dijadikan sebagai penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam mengumpulkan data.⁵⁶ Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Data yang telah diperoleh melalui penelitian akan

⁵³Syamsuddin AB, *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosil*, h. 103.

⁵⁴Husain Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. IV: Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 73.

⁵⁵Sutrisno Hadi, *Metodolgi Research* (Yogyakarta: UGM Press, 1999), h. 72.

⁵⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 68.

diolah menjadi suatu informasi yang merujuk pada hasil penelitian nantinya. Oleh karena itu, maka dalam pengumpulan data di butuhkan beberapa instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat.

Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrumen yang digunakan. Oleh karena itu, untuk penelitian lapangan (*feild research*) yang meliputi pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan kamera, alat perekam (*recorder*) dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pengkalisifikasian, pengkategorian, penyusunan, dan elaborasi sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data ini bertujuan untuk mencari dan menata data secara sistematis dari hasil rekaman atau catatan wawancara, observasi dan dokumen yang telah dilakukan.⁵⁷

Untuk melakukan analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari angan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

⁵⁷Syamsuddin AB, *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial*, h. 111.

Dengan demikian data yang telah direduksi, akan memberikan gambaran yang lebih jelas.⁵⁸ Reduksi data akan berlangsung secara terus-menerus selama penelitian sampai pada penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Miles dan Huberman dalam buku Suproyogo dan Tobroni mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan seluruh informasi yang tersusun dan kemungkinan adanya kesimpulan dan penarikan tindakan.⁵⁹ Penyajian dan kualitatif disajikan dalam bentuk teks *naratif*, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Analisis Perbandingan (*Comparative*)

Peneliti akan mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam kemudian membandingkan data tersebut satu sama lain antara informan yang satu dengan yang lain..

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama ini di lapangan diverifikasi selama

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian, kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 247.

⁵⁹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2001), h. 71.

penelitian berlangsung, dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan yang dikonfirmasi ke informan.

G. Keabsahan Data

Data merupakan penyajian serta pengorganisasian data dalam satu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yang menguraikan setiap permasalahan dalam masalah penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara spesifik.



BAB IV

**MANAJEMEN KINERJA APARATUR DESA DALAM MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN DI DESA TAENG KECAMATAN PALLANGGA
KABUPATEN GOWA**

A. Gambaran Umum Lokasi Kantor Desa Taeng

Kantor Desa Taeng berada di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan pada awalnya Desa Taeng merupakan sebuah dusun dalam wilayah Desa Bontoala yang terletak di sebelah utara berbatasan dengan sungai Je'neberang.

Pada saat ini Desa Bontoala adalah sebuah Desa yang cukup luas, walaupun telah mengalami beberapa pemekaran. Dusun Taeng pada saat itu merupakan pusat pemerintahan desa karena kantor desa berada di dusun Taeng. Namun setelah kepemimpinan Abd. Rahim Alauddin Kr. Kulle berakhir dan dilanjutkan oleh Sangkala Dg. Ngawing sebagai kepala desa terpilih pada saat itu, maka pusat pemerintahan Desa Bontoala berpindah ke Bontomajannang, dengan membangun kantor desa baru. Setelah kepemimpinan Sangkala Dg. Ngawing berjalan beberapa tahun muncul gagasan dari para tokoh pemuda dan tokoh masyarakat untuk membentuk desa tersendiri.⁶⁰

Setelah melalui beberapa proses maka pada tahun 1999 berdirilah sebuah desa baru dari hasil pemekaran Desa Bontoala dan disepakatilah Taeng sebagai nama desa

⁶⁰Arsip, Kantor Desa Taeng, Tahun 2019.

baru tersebut. Sebagai kepala desa persiapan yang baru maka ditunjuklah AR. Yasin Alauddin Kr. Ngaseng sebagai kepala desa persiapan Taeng dan hanya berjalan ± 1 tahun, disebabkan beliau wafat pada tahun 2000. Sebagai pelaksana tugas dalam kekosongan pada saat itu, maka sekretaris desa mengambil alih segala tugas-tugas kepala desa sampai tahun 2001.⁶¹

Berdasarkan hasil musyawarah Desa Bontoala, maka disepakatilah Nurdin Yasin sebagai kepala desa persiapan Taeng pada tahun 2001. Selanjutnya pada tahun 2007 desa persiapan Taeng menjadi desa defenitif dan sekaligus pemilihan kepala desa I dan Nurdin Yasin Dg. Nyikko sebagai kepala Desa Taeng.

1. Letak Desa

Desa Taeng adalah salah satu desa di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibu kota kecamatan ± 3 km dengan waktu tempuh 5 menit dan dari ibu kota kabupaten 4 km dengan waktu tempuh 7 menit.

Batas-batas administratif pemerintahan Desa Taeng Kecamatan Pallangga sebagai berikut:

Batas Wilayah :

- a. Utara : Sungai Je'neberang
- b. Selatan :Desa Kanjilo Kecamatan Barombong
- c. Barat : Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong
- d. Timur : Desa Bontoala⁶²

⁶¹Arsip, Kantor Desa Taeng, Tahun 2019.

⁶²Arsip, Kantor Desa Taeng, Tahun 2019.

2. Administrasi Desa

Secara administrasi Desa Taeng terdiri dari 2 Dusun, yakni Dusun Taeng dan Dusun Gantarang. Untuk Dusun Taeng terdiri dari RW dan 20 RT sedangkan Dusun Gantarang terdiri dari 7 RW dan 18 RT

3. Topografi Desa

Dilihat dari topografinya dan kontur tanah, Desa Taeng secara umum berupa daerah datar yang berada pada ketinggian ± 4 m di atas permukaan laut (sebagai areal pemukiman, persawahan, perkebunan), dengan luas wilayah 2,27Km². Sedangkan letak koordinat DesaTaeng 5°11' 46,52" LS 119° 26' 02.09" BT, dengan kemiringan 2–5 °.

4. Luas dan Pemanfaatan Lahan Desa

Luas wilayah Desa Taeng adalah 227 Ha, dimanfaatkan untuk :

a. Nonpertanian

Lahan non pertanian yang dimaksud sudah tercakup di dalamnya untuk perumahan, industri, perkantoran, jalan, prasarana umum, lapangan, lahan hijau dengan luas keseluruhan 157,91 Ha

b. Persawahan

Wilayah persawahan yang ada di Desa Taeng setiap tahun semakin berkurang disebabkan adanya alih fungsi lahan menjadi pengembangan perumahan. Sehingga luas sawah yang masih ada sekarang sekitar 64,69 Ha, terdiri atas :

- Sawah tadah hujan : 34.20 Ha
- Sawah beririgasi teknis : 30.49 Ha

- Lahan pertanian non sawah : 4.40 Ha

Pengalihan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman selama setahun terakhir sekitar 0,36% .

c. Sungai

Desa Taeng termasuk desa yang dialiri oleh sungai Je'neberang dengan panjang 2,3 km dan luas 0,75 km² yang dimanfaatkan oleh

Warga Desa Taeng sebagai transportasi sungai.

d. Irigasi

Irigasi yang ada di desa panjangnya hanya 238 m yang hanya mampu mengairi persawahan yang ada di Jingaraka saja. Ini semua diakibatkan karena irigasi yang telah dibangun sudah tertimbun akibat pengembangan perumahan.⁶³

Tabel 4.1.
Jenis tanah dan luas

No	PENGGUNAAN	LUAS
	Tanah Sawah	34,2
	Tanah Kering	157,91
	Tanah Basah	4,40
	Fasilitas Umum	0,65

Sumber : Dokumen Desa Taeng 2019

5. Iklim dan Curah Hujan

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Desa Taeng berada pada iklim tropis, dan mempunyai 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau.

⁶³Arsip, Kantor Desa Taeng, Tahun 2019.

Musim kemarau berlangsung pada bulan April - September, dan musim hujan berlangsung pada bulan Oktober – Maret.

Curah hujan rata-rata 2000 mm sampai 3000 mm, kondisi curah hujan tertinggi antara bulan Desember sampai bulan Januari.

6. Perekonomian Desa

Secara umum sumber perekonomian ataupun mata pencaharian penduduk dapat dijabarkan sebagai berikut :

TABEL 4.2.
Mata Pencaharian Desa Taeng

NO	MATAPENCAHARIAN	JUMLAH			JUMLAH	(%)
		L	P	AH		
1	Petani	45	0	45	0,49	
2	Pelajar/Mahasiswa	1.689	1.736	3.425	37,48	
3	Pegawai Swasta	398	127	525	5,75	
4	Pedagang	170	302	472	5,17	
5	Pegawai Negeri Sipil	189	55	244	2,67	
6	TNI/Polri	134	1	135	1,48	
7	Buruh Swasta	880	69	949	10,39	
8	Pengrajin	3	5	8	0,09	
9	Penjahit	6	9	15	0,16	
10	Tukang Kayu	47	0	47	0,51	
11	Dokter	0	2	2	0,02	
12	Sopir / Pengemudi	45	0	45	0,49	
13	Pengusaha	19	8	27	0,30	
14	Pegawai BUMN	22	9	31	0,34	
15	Mengurus Rumah Tangga	0	926	926	10,13	
16	Belum / Tidak Bekerja	861	1.380	2.241	24,53	
JUMLAH		4.508	4.629	9.137	100	

Sumber : dokumen Desa Taeng 2019

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Taeng jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 27,86%. Dari jumlah tersebut

kehidupannya bergantung sebagai buruh harian, ada sekitar 10,39% dari total jumlah penduduk. Sumber-sumber perekonomian Desa Taeng, terbagi dalam beberapa sektor:

a. Sektor Pertanian

Luas lahan pertanian Desa Taeng adalah 64.69 Ha yang dikelola oleh 3.2% oleh para petani, hal ini disebabkan karena :

1) Adanya beberapa lahan pertanian yang semakin tergeser dengan adanya pengembangan lokasi perumahan sehingga beberapa petani beralih profesi.

2) Area pertanian yang beririgasi hanya 13.43 % dengan produksi 4 ton/Ha dengan dua kali musim tanam. Sedangkan sawah tadah hujan 34.20 Ha dengan hasil sekali panen sekitar 4 ton/Ha.

3) Selain masalah tersebut di atas penerapan teknologi dikalangan petani masih kurang sehingga ikut mempengaruhi produktifitas hasil pertanian.

b. Sektor Peternakan

1) Peternak yang ada di Desa Taeng terdiri atas: peternak ikan nila, kegiatan ini memanfaatkan sungai Je'neberang di mana banyak masyarakat beternak ikan nila

2) Sementara warga yang memelihara ternak seperti ayam buras, kambing dan lainnya hanya sebatas pekerjaan sampingan sajadan belum diandalkan untuk peningkatan pendapatan. Namun apabila mau dikelola dengan baik sangat menjanjikan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

c. Sektor Kerajinan

Desa Taeng terdapat beberapa usaha kerajinan seperti usaha meubel,

pertenunan sarung sutera, dimana memproduksi hanya sebatas pesanan saja. Sementara apabila dikelola secara baik, maka akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang baru.

d. Sektor Jasa (tukang batu, tukang kayu, bengkel, ojek, tukang becak)

Pekerjaan buruh harian merupakan alternative termudah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Pekerjaan buruh harian merupakan pekerjaan turun temurun.

e. Sektor Perdagangan

Bertambahnya jumlah penduduk di Desa Taeng tiap tahunnya secara signifikan dikarenakan perkembangan perumahan yang banyak, menyebabkan masyarakat banyak yang bergerak di sektor perdagangan, baik grosiran maupun warung campuran.

Tabel 4.3.
Usia Produktif

O	TENAGA KERJA	JUMLAH		TOTAL JUMLAH
	Penduduk Usia Produktif	1.958	587	2.545
	Ibu Rumah Tangga		26	26 ⁹
	Penduduk Masih Sekolah	1.689	1.736	3.425
	Penduduk non Produksi	861	1.380	2.241
	JUMLAH	.508	.629	9.137

Sumber : dokumen Desa Taeng 2019

7. Keadaan Budaya Statistik Sosial Desa

a. Jumlah Penduduk

Desa Taeng mempunyai jumlah penduduk 9.137 Jiwa, dengan KK 2.086 yang tersebar dalam 2 wilayah dusun yakni Dusun Taeng dan Dusun Gantarang. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 4.508 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 4.629 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat seperti tabel berikut.

Tabel 4.4.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Dusun	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Taeng	2.467	2.487	4.954
Gantarang	2.041	2.142	4.183
JUMLAH	4.508	4.629	9.137

Sumber : dokumen Desa Taeng 2019

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki atau ada sekitar 50.66 % dari total penduduk.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 4.5.
Agama di Desa Taeng

No	A G A M A	J U M L A H			PERSENT ASE (%)
		L	P	Jml	
1	Islam	4.150	4.191	8.424	92,20
2	Kristen Katolik	5	8	13	0,14
3	Kristen Protestan	36	49	85	0,93
4	Budha	2	2	4	0,04
5	Hindu	4	5	9	0,10
6	Atheis	0	0	0	0,00
	JUMLAH	4.197	4.255	9.137	100

Sumber : dokumen Desa Taeng 2019

Sebelum pengembangan perumahan di Desa Taeng, agama yang dianut oleh warga Desa Taeng 100% beragama Islam, namun karena pembangunan perumahan tiap tahun bertambah menyebabkan banyak warga dari luar yang beragama lain menetap dan menjadi bagian penduduk Desa Taeng. Dari tabel di atas penduduk yang beragama Islam sebesar 92,20% yang beragama Kristen sebesar 1,07% yang beragama Budha sebesar 0.04% dan Hindu sebesar 0.01%. Walaupun agama Islam yang mayoritas di Desa Taeng, namun sangat menghormati agama yang lain.

Jumlah kartu keluarga yang masuk dalam kategori kartu keluarga prasejahtera sebesar 12.91% dan diharapkan akan berkurang tiap tahunnya. Usaha ekonomi produktif yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Desa Taeng memungkinkan untuk mengurangi jumlah kartu keluarga prasejahtera yang ada.

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan tingkat pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru, dengan sendirinya akan mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Taeng.

Tabel 4.6.
Tingkat pendidikan

No	Uraian	Jumlah		Persentasi (%)
		L	P	
1	Belum Sekolah	710	721	15,66
2	Tidak/belum tamat SD	901	853	19,20
3	Tamat SD	789	744	16,78
4	Tamat SLTP	764	811	17,24
5	Tamat SLTA	815	880	18,55
6	Sarjana Muda (D3)	251	315	6,19
7	Sarjana (S1)	234	256	5,36
8	Pasca Sarjana (S2)	37	52	0,98
9	Pasca (S3) dll	3	1	0,04
Jumlah		4.504	4.633	100

Sumber : dokumen Desa Taeng 2019

8. Deskripsi dan Statistik Prasarana dan Sarana Desa

Dari seluruh sarana dan prasarana yang ada di Desa Taeng terdiri atas :

a. Sarana Jalan

Tabel 4.7.
Sarana Jalan

NO	Jenis Jalan	Lokasi	Volume (m)	KET
1	Jalan Kabupaten	Kaledupaya, Taeng, Campagaya, Bontojalling, Gantarang	2.030	Baik
2	Jalan Desa	Bontojalling, Ana'gowa	1.517	Baik
3	Jalan Lingkungan	Dusun I dan Dusun II	5.433,5	Sebagian rusak
4	Jalan Setapak /tanah	Dusun I dan Dusun II	2.687	Masih ada jalan tanah
5	Jembatan	Jingaraka	11.667.5	Baik

Sumber : dokumen Desa Taeng 2019

Sarana jalan yang ada di Desa Taeng meliputi jalan Kabupaten yang mana bisa terhubung ke Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, kondisi jalan ini sudah mulai berlubang di beberapa titik lokasi. Sedangkan kondisi jalan desa yang ada sudah mulai rusak berat, ini disebabkan karena jalan ini sudah lama dan dilewati truk-truk yang mengangkut bahan bangunan akibat pembangunan perumahan yang ada di Desa Taeng.

Untuk jalan lingkungan dan jalan setapak yang ada sebagian sudah pengerasan ataupun dipaving blok, namun begitu masih ada yang berupa jalan tanah, dan diharapkan untuk tahun-tahun ke depan semua jalan lingkungan ataupun jalan setapak sudah diaspal ataupun dipaving blok.

Jembatan yang ada di Desa Taeng (Jingaraka) yang menghubungkan dengan desa tetangga (Desa Kanjilo) kondisinya baik, jembatan ini dipergunakan oleh warga untuk beraktifitas karena menghubungkan akses jalan yang dekat menuju Kabupaten ataupun Kota Makassar untuk menjual hasil panen maupun sayur mayur. Begitu juga dengan anak-anak sekolah yang mana lebih dekat dengan melewati jembatan ini untuk menuju ke sekolah yang ada di desa tetangga ataupun sekolah yang ada di kecamatan.

b. Sarana Ibadah

Sarana Ibadah yang ada di Desa Taeng berjumlah 11 buah dan 1 Mushallah yang dipergunakan oleh masyarakat untuk beribadah. Untuk kelanjutan pembangunan sarana ibadah ini masyarakat berswadaya, namun begitu masih ada beberapa Masjid yang memerlukan penanganan bantuan.

Jumlah sarana ibadah di dua dusun yakni pada Dusun Taeng mempunyai 6 Masjid 1 Mushallah dan Dusun Gantarang mempunyai 6 masjid. Lengkapnya seperti tabel berikut:

Tabel 4.8.
Sarana Ibadah

NO	PRASARANA	JUMLAH	KET
1	Masjid	12	
2	Mushallah	1	
3	Gereja	0	
4	Vihara	0	

Sumber : dokumen Desa Taeng 2019

c. Sarana Pendidikan

Tabel 4.9.
Sarana sekolah

NO.	SEKOLAH	Jumlah			
		Bangunan Fisik	Murid	Guru	
1	TK	3	315	9	
2	SD	4	1754		

Sumber : dokumen Desa Taeng 2019

Sarana pendidikan yang ada di Desa Taeng sekarang hanya terdiri dari tingkatan TK dan SD saja, dulu pernah ada sekolah lanjutan pertama yakni SMP Islam Istiqlal namun oleh pengelola sekolah ini ditutup pada tahun 2007.

Untuk TK yang ada sekarang masih banyak memerlukan bantuan, baik untuk penambahan ruangan belajar (kelas) maupun sarana bermain bagi muridnya, dan untuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sampai saat ini belum mempunyai gedung sendiri dan hanya meminjam gedung bekas SMP Islam Istiqlal.

Pada halaman sekolah dasar yang ada (SDI Bontoala I, II, SDN Taeng, SDN Belaka) pada musim hujan tergenang air, becek dan pada musim kemarau berdebu sehingga mengganggu aktifitas proses belajar mengajar.

Untuk sarana yang ada masih jauh dari yang diharapkan, seperti sarana komputer, yang mana diharapkan dengan sarana ini siswa ataupun guru akan lebih mudah mengakses dunia internet.

d. Sarana Kesehatan

Penanganan kesehatan warga, masih menggunakan POSKESDES (posyandu kesehatan desa) jika penanganannya tidak terlalu parah misalnya demam, batuk-batuk, sedangkan jika memerlukan penanganan yang lebih serius warga biasanya berobat ke rumah sakit yang ada di Kabupaten ataupun ke Kota Makassar.

Untuk penanganan kesehatan ibu dan anak, posyandu sangat berperan aktif. baik untuk penimbangan balita, pemberian vitamin maupun penyuluhan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan oleh para kader posyandu dan di bantu tenaga kesehatan dari kecamatan. Warga juga memanfaatkan pondok bersalin yang ada di Taeng, baik untuk pemeriksaan kehamilan maupun dalam proses melahirkan.

Tabel 4.10.
Sarana Kesehatan

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Poskesdes	1	Aktif
2	Posyandu	4	Aktif, tidak mempunyai gedung
3	Pondok Bersalin	1	Aktif
4	Dokter Praktek (Umum)	1	Aktif

Sumber : dokumen Desa Taeng 2019

e. Sarana Olah Raga

Tabel 4.11.
Sarana Olah Raga

No	Lokasi	Jumlah	KET
1	Lapangan Sepak Bola	1	
2	Lapangan Bulutangkis	2	
3	Tennis Meja	2	

Sumber : dokumen Desa Taeng 2019

Sarana olah raga yang sering dimanfaatkan oleh warga adalah lapangan sepak bola, namun kondisi dari lapangan tersebut masih jauh dari harapan, di mana pada saat musim hujan tergenang dan becek, demikian juga dengan prasarananya seperti WC ataupun ruang ganti tidak ada. Padahal kalau dikelola dengan baik bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan desa dengan menyewakan kepada pengelola sekolah sepak bola yang mana sangat kesulitan mendapatkan lapangan.

Untuk sarana bulutangkis hanya dipergunakan pada saat musim hujan saja, ini disebabkan karena lapangan yang ada adalah lapangan terbuka.

f. Deskripsi dan Statistik Pemerintahan Umum Pemerintahan Desa

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. kepala desa mempunyai fungsi:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Pemerintah Desa)
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa

- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD (Badan Pemerintah Desa) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD (Badan Pemerintah Desa)
- d. Membina kehidupan masyarakat desa membina perekonomian desa
- e. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.⁶⁴

Tabel 4.12.
Struktur Pemerintahan

No	Nama	Jabatan
1	H. Nurdin Yasin	Kepala Desa
2	Muh. Kasim, SH	Sekretaris Desa
3	M. Putra Aditama	Kaur Umum
4	Nurseha, SE	Kasi Pemerintahan
5	Muhammad Nur, S.Sos	Kasi Kesra
6	Rifandi, S.Pd	Kaur Keuangan
7	Sardiah	Kaur Administrasai
8	Muh. Asyari	Kasi Pembangunan
9	Siti Nur Khadijah, S.IP	Staf Keuangan
10	Megawati	Staf Administrasi
11	Mulya Hamzah	Kadus Taeng
12	M. Hasjim	Kadus Gantarang

Sumber dokumen Desa Taeng 2019

9. Hydroligi dan Tata Air

Untuk kebutuhan masyarakat menyangkut masalah air terbagi atas air permukaan tanah dan air tanah. Air permukaan tanah terdiri dari air sungai, dan air kubangan. Pada dasarnya seluruh sumber air permukaan tanah dimanfaatkan untuk irigasi, transportasi, usaha perikanan.

⁶⁴Arsip, Kantor Desa Taeng, Tahun 2019

Pemanfaatan air tanah dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, sebagai sumber air minum dan sebagian lagi untuk pompanisasi pada area persawahan yang tidak diairi sarana irigasi.

Untuk kebutuhan rumah tangga, masyarakat menggunakan air sumur gali 28,7 % dan sumur bor mesin 71,3 %. Kondisi air di Desa Taeng jernih dan keadaan tanah berpasir dengan rata-rata kedalaman 4 – 6 m.⁶⁵

Pemerintahan Desa Taeng bertempat di Dusun Taeng, dan telah memiliki gedung kantor dan aula pertemuan. Namun lahan yang dipakai statusnya masih hak pakai, sehingga untuk merenovasi bangunan kantor terkendala dalam hal status tanah yang ditempati. Di kantor Desa Taeng telah dilengkapi dengan mobiler berupa meja, kursi, lemari, papan potensi, dan komputer.

Pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan setiap hari jam kerja kadang kala ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari. Namun masih perlu peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia). Peningkatan kapasitas yang dimaksud adalah menyangkut tugas dan fungsinya masing-masing antara lain: keterampilan administrasi, pengoperasian komputer, dan teknik pelayanan tugas kepada masyarakat.⁶⁶ Sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang baik yang telah diberikan oleh pemerintah desa dan jajarannya.

⁶⁵Arsip, Kantor Desa Taeng, Tahun 2019

⁶⁶ Arsip, Kantor Desa Taeng, Tahun 2019

B. Manajemen Kinerja Aparatur Desa di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Manajemen kinerja dalam sebuah kegiatan atau pemerintahan sangat dibutuhkan, kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis. Kinerja aparatur desa memiliki keterkaitan yang sangat erat karena tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki. Pemerintahan dijalankan oleh aparatur desa yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai suatu tujuan.

Menurut Muh. Kasim, SH mengatakan bahwa:

“Kalau manajemennya dari kepala desa ke sekretaris desa dan dibantu kaur, kasi dan kepala dusun. Mereka mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing”.⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dari semua aparat desamemiliki fungsi dan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab.

Pendapat di atas diperkuat oleh Muh. Asyari mengenai manajemen kinerja yang mengatakan bahwa:

“Kalau manajemen kinerja aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan harus menggunakan perencanaan kinerja. Perencanaan awal yang dilakukan adalah mulai dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang merupakan rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kemudian ada RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) desa yang sifatnya 1 (satu) tahun berlaku dan semuanya dibentuk dalam peraturan desa. Perencanaan terakhir yang dilakukan adalah MUSREMBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) yang dilaksanakan setahun sekali yaitu pada

⁶⁷Muh Kasim, Sekretaris Desa, “Wawancara” pada Tanggal 05 Februari 2020Pukul 10.20 Wita.

bulan Juli yang diikuti oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat serta diketahui oleh pendamping desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Kemudian setelah dilaksanakan musyawarah maka yang menjadi pelaksana adalah pemerintah desa itu sendiri. Tetapi masih kurang evaluasi yang dilakukan pemerintah desa kepada jajarannya”.⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perencanaan awal yang dilakukan yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) sampai dengan MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) desa yang melibatkan tokoh masyarakat diantaranya kepala Dusun, RT/RW dan seluruh jajaran BPD (Badan permusyawaratan Desa). Ketua BPD (Fatimah), wakil ketua (Sufyan), sekretaris (Nasir B), bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan (Baso Bulu, Syamsuddin. Hatijah) dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan (H.Muh.Tahir, H.Hasanuddin, Nurati). Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan. Secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Kemudian mengenai manajemennya masih kurang baik karena belum ada evaluasi yang dilakukan.

Pendapat dari Fatmawati selaku ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengenai manajemen kinerja mengatakan bahwa:

“Manajemen kinerja dari pemerintah desa dan jajarannya selalu mengutamakan kekompakan dan kerjasama karena kegiatan tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama. Kekompakan dan kerjasama yang dimaksud adalah saling membantu dalam berbagai hal. Perencanaan awal dimulai dari aspirasi warga melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kemudian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sampai dengan pengawasan kegiatan. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan wadah atau tempat menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang disalurkan

⁶⁸Muh Asyari, Kepala Seksi Pembangunan, “*Wawancara*” pada Tanggal 05 Februari 2020 Pukul 16.00 Wita.

melalui MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan). Jadi untuk realisasinya nanti pemerintah desa dan jajarannya yang melakukan, kemudian sebagai BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selalu mengawasi kinerja pemerintah desa itu sendiri, apakah di dalam pengelolaan dana yang ada pemerintah desa bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan di MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) atau tidak. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bukanlah lawan untuk pemerintah desa dan jajarannya tetapi merupakan kawan kerja dalam merencanakan kegiatan sampai kegiatan terealisasi dan juga merupakan kawan untuk membangun desa itu sendiri. Kemudian pelaksanaan kinerja yang ada di Desa Taeng BPD (Badan Permusyawaratan Desa) juga bekerjasama dengan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan desa”.⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selalu bekerjasama dengan pemerintah desa dan jajarannya dalam membangun Desa Taeng.

Perencanaan kinerja desa dimulai dengan adanya aspirasi warga Desa Taeng melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kemudian pemerintah desa membuat program kerja dengan melakukan MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) yang dilakukan setahun sekali pada bulan Juli.

Kemudian mengenai pelaksanaan yang merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun sedemikian rupa secara matang serta terperinci dan implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dikatakan perencanaan sudah dianggap siap apabila telah melaksanakan MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) dan hasil dari MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) akan dijalankan oleh pemerintah desa dan jajarannya yang dipantau oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Adapun pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa Taeng pada

⁶⁹Fatimah, Kepala Badan Permusyawaratan Desa. “Wawancara” pada Tanggal 12 April 2020 Pukul 16.50 Wita

bidang pembangunan desa adalah penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA non formal milik desa, dukungan penyelenggaraan, penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja kepada para aparatur desa dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pemerintah desa selalu mengawasi kinerja aparaturnya dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapat dari H. Nurdin Yasin selaku kepala Desa mengenai manajemen kinerja mengatakan bahwa:

“Manajemen kinerja aparatur Desa di Desa Taeng, selalu mengutamakan perencanaan dalam setiap kegiatan, baik dari kegiatan pembangunan maupun kegiatan yang diadakan di dalam kantor misalkan pelaksanaan jum’at ibadah. Kemudian sebagai pemerintah Desa harus memberikan masukan dan pengawasan kepada staf, kepala urusan dan kepala seksi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”.⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kepala desa selalu memberikan masukan dan mengawasi aparatur desa demi meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Menjadi aparatur desa harus mampu bertanggung jawab menjalankan segala tugas yang telah ditentukan. Tanggung jawab merupakan kesadaran tiap individu akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

⁷⁰Nurdin Yasin, Kepala Desa, “*Wawancara*” pada Tanggal 09 Maret 2020 Pukul 11.15 Wita.

Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban atau tugas yang dimiliki oleh setiap individu.

Wawancara di atas didukung oleh pendapat Rifandi:

“Manajemen kinerja yang ada di Desa Taeng masing-masing mempunyai tupoksinya jadi mereka memiliki pekerjaan yang sesuai dengan fungsi masing-masing. Namun secara umum ketika pekerjaan misalkan kaur administrasi selesai bisa membantu teman yang lain yang belum selesai mengerjakan tugas atau tanggung jawabnya contohnya pengetikan surat-surat mereka saling bersinergi untuk saling membantu atau bekerja secara kolektif”.⁷¹

Pertanyaan diatas tersebut dapat diketahui bahwasanya, manajemen kinerja di Desa Taeng memiliki pekerjaan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing dan sangat erat hubungan kerja sama aparatur desa dalam membantu menyelesaikan tanggung jawabnya.

Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh. Hasil evaluasi kinerja Desa Taeng juga melalui proses penilaian yang dilakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kemudian diperiksa kesesuaian hasil evaluasinya dari hasil MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan)

Pendapat lain dari Muhammad Nur S.Sos mengenai manajemen kinerja:

Berbicara tentang manajemen kinerja aparatur desa yang ada di Desa Taeng, kalau dilihat secara sekilas untuk manajemennya sendiri masih kurang baik karena belum ada yang namanya evaluasi setiap minggunya, evaluasi setiap bulannya atau evaluasi pertahunnya. Bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja aparatur desa mulai dari kepalaurusan dan kepala seksi bahkan pemerintah paling bawah yaitu RT RW yang bisa menopang kinerja

⁷¹Rifandi, Kepala Urusan Keuangan, “Wawancara” pada Tanggal 09 Maret 2020 Pukul 11.00 Wita.

pemerintah desa. Kemudian hasil dari kinerja itu sendiri dapat dilihat apakah pemerintah desa berkembang atau maju dalam artian sistem pemerintahannya apakah sudah efisien atau efektif.⁷²

Dari pertanyaan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa manajemen kinerja yang ada di Desa Taeng perlu yang namanya evaluasi dalam setiap kegiatan.

Dari pembahasan di atas dapat dibuktikan bahwa manajemen kinerja aparatur desa yang ada di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan mulai dari sebuah perencanaan yang baik, yang melibatkan semua warga desa melalui MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) yang dilaksanakan setahun sekali yaitu pada Juli dan berasal dari aspirasi warga desa yang mereka tuangkan melalui BPD (Badan permusyawaratan Desa). Adapun Hasil MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) adalah pemeliharaan prasarana jalan desa yaitu (gorong-gorong, selokan, parit, drainase), pembangunan jamban umum, pengadaan transportasi desa, penyelenggaraan festival kesenian adat kebudayaan, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, penyelenggaraan posyandu, koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi. Hasil ini dilaksanakan oleh aparat desa yang didukung penuh oleh warga desa dalam bentuk kerja sama dan kompak dalam melaksanakan program kerja. Kemudian kepala desa selalu memberikan masukan dan pengawasan kepada stafnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun dalam hal

⁷²Muhammad Nur, Kepala Urusan Kesejahteraan, "Wawancara" pada Tanggal 12 Maret 2020 Pukul 21.43 Wita.

evaluasi kinerja belum terlaksana dengan baik yang disebabkan karena pemerintah desa yang kurang mengevaluasi kinerja bawahannya.

C. Pembangunan di Desa Taeng Kecamatan Pallangga kabupaten Gowa

Pembangunan desa merupakan pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa dan karakteristik kawasan pemukiman. Kemudian pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari dana desa.

ADD (Alokasi Dana Desa) merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada Desa, yang sumbernya berasal dari BHPD (Bagi Hasil Pajak Daerah) serta dari DPKPDD (Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah) yang diterima oleh Kabupaten. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui ADD (Alokasi Dana Desa) diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Tahun 2020 Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Tabel 4.13.
Anggaran Pendapatan Desa

NO	PENDAPATAN DESA	ANGGARAN (RP)
1	Pendapatan Asli Desa	45.000.000,00
2	Hasil Usaha Desa	35.000.000,00
3	Swadaya, Partisipasi dan Gorong Royong	10.000.000,00
4	Pendapatan Transfer	2.428.027.735,00
5	Dana Desa	1.631.323.000,00
6	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	10.356.924,00
7	Alokasi Dana Desa	786.345.807,00
8	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00
9	Bunga Bank	5.000.000,00
JUMLAH		2.478.025.735,00

Sumber : dokumen Desa Taeng 2020

Tabel 4.14.
Anggaran Belanja Desa

NO	BELANJA DESA	ANGGARAN (RP)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	735.993.442,00
2	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunangan Dan Operasional Pemerintahan Desa	704.541.937,00
3	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.000.000,00
4	Belanja Pegawai	51.000.000,00
5	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	291.600.000,00
6	Belanja Pegawai	291.600.000,00
7	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.948.416,00
8	Belanja Pegawai	17.948.416,00
9	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	90.345.521,00
10	Belanja Barang dan Jasa	89.945.521,00
11	Belanja Modal	400.000,00
12	Penyediaan Tunjangan BPD	113.400.000,00
13	Belanja Pegawai	113.400.000,00
14	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam)	22.048.000,00
15	Belanja Barang dan Jasa	22.048.000,00
16	Penyediaan Insentif, Operasional RT/RW	118.200.000,00
17	Belanja Barang dan Jasa	118.200.000,00
18	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.708.348,00
19	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/	22.708.348,00

	Pemerintahan	
20	Belanja Modal	22.708.348,00
21	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.743.157,00
22	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa)	11.952.000,00
23	Belanja Barang Desa	11.952.000,00
24	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	14.791.157,00
25	Belanja Barang dan Jasa	14.791.157,00
26	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.856.488.600,00
27	Sub Bidang Pendidikam	181.662.700,00
28	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA	13.800.000,00
29	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00
30	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	55.430.800,00
31	Belanja Barang dan Jasa	55.430.800,00
32	Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan	57.431.900,00
33	Belanja Modal	57.431.900,00
34	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.000.000,00
35	Belanja Modal	5.000.000,00
36	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	50.000.000,00
37	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00
38	Sub Bidang Kesehatan	233.843.400,00
39	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa	12.155.000,00
40	Belanja Barang dan Jasa	12.155.000,00
41	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	130.012.000,00
42	Belanja Barang dan Jasa	114.172.000,00
43	Belanja Modal	15.840.000,00
44	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	34.244.500,00
45	Belanja Barang dan Jasa	34.244.500,00
46	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	57.431.900,00
47	Belanja Modal	57.431.900,00
48	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	922.322.500,00
49	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Parit, Drainase dll)	10.000.000,00
50	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00
51	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan	777.359.800,00
52	Belanja Modal	777.359.800,00

53	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Parit, Drainase dll)	84.962.000,00
54	Belanja Modal	84.962.000,00
55	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Desa	50.000.000,00
56	Belanja Modal	50.000.000,00
57	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	338.660.000,00
58	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MKC Umum dll)	56.000.000,00
59	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00
60	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	282.660.000,00
61	Belanja Modal	282.660.000,00
62	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	180.000.000,00
63	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan, Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	100.000.000,00
64	Belanja Modal	100.000.000,00
65	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	80.000.000,00
66	Belanja Modal	80.000.000,00
67	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	68.196.600,00
68	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.600.000,00
69	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.600.000,00
70	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00
71	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.200.000,00
72	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat Kebudayaan dan Kagamaan	30.200.000,00
73	Belanja Barang dan Jasa	30.200.000,00
74	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.396.600,00
75	Pembinaan PKK	16.396.600,00
76	Belanja Barang dan Jasa	16.396.600,00
77	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	80.145.000,00
78	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	36.000.000,00
79	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	36.000.000,00
80	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00
81	SUB Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	44.145.000,00
82	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	44.145.000,00
83	Belanja Barang dan Jasa	44.145.000,00
84	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA	35.694.938,00

	DARURAT DAN MENDESAK DESA	
85	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	35.694.938,00
86	Kegiatan Penanggulangan Bencana	35.694.938,00
87	Belanja Tidak Terduga	35.694.938,00
JUMLAH BELANJA		2.794.518.580,00

Sumber : dokumen Desa Taeng 2020

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) adalah peraturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Pendapat dari Fatimah selaku kepala Badan Permusyawaratan Desa mengenai pembangunan desa mengatakan bahwa:

“Pembangunan infrastruktur yang telah terealisasi yaitu: pembuatan paving blok di beberapa lokasi, pembangunan posyandu, pekerjaan talud, plat duiker yang menghubungkan antara jalan poros ke Bontojalling guna terhindar dari kecelakaan karena lokasi ini merupakan lokasi yang sangat rawan, pembuatan drainase, dan pembangunan jamban keluarga sebanyak 4 unit yang diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Kemudian pemanfaatan sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan jahit menjahit, kerajinan tangan seperti pembuatan tas pesta, pelatihan administrasi pkk, pelatihan dasa wisma dan pelatihan kader sandang pangan yang bertujuan agar sumber daya manusia yang ada di taeng dapat berkembang. Kemudian ada yang namanya RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang di dalamnya terangkum semua pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Adapun musyawarah dusun yang bertujuan untuk menggali aspirasi apa-apa saja yang akan dilakukan untuk pembangunan di dusunnya. Kemudian pada saat MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) dilaksanakan, setiap dusun mengemukakan pendapat untuk dusunnya yang perlu dibenahi. Setelah ada pelaksanaan MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) ada namanya RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa). RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) ini termasuk Desa Taeng berdasarkan dari apa yang telah disesuaikan di MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) pembangunan-pembangunan apa yang akan dilaksanakan pada tahun yang ditentukan. Kemudian RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) di Perdeskan, setelah ada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) ada lagi yang namanya APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), di dalam APBD

(Anggaran Pendapatan Belanja Desa) sudah berbicara mengenai anggaran. Tetapi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) tidak bisa dilaksanakan jika pagu anggaran belum didapatkan, kemudian apabila pagu anggaran dari pihak Kabupaten sudah cair untuk Desa Taeng maka sudah bisa diadakan musyawarah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa). Jadi dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) di ramu yang mana termasuk prioritas utama itu yang diutamakan dibiayai berdasarkan anggaran yang diperoleh dari Kabupaten. Tetapi anggaran itu tidak monoton untuk pembangunan saja karena ada tunjangan untuk BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan gaji pemerintah desa dan jajarannya. Semua telah dirangkum dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa)".⁷³

Pembangunan di Desa Taeng sudah berjalan dengan baik berkat bantuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang selalu membantu pemerintah desa dan jajarannya sehingga mencapai pembangunan yang 100% terealisasi dibandingkan desa lainnya. Keberhasilan pembangunan juga sangat tergantung oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) misalkan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan anggaran sejumlah Rp.922.322.500,00. Pembangunan yang dikatakan sukses dapat dilihat dari anggaran dan kinerja pemerintah setempat.

Adapun hasil wawancara dari H.Nurdin Yasin selaku Kepala Desa mengenai pembangunan mengatakan bahwa:

“masalah pembangunan dari dusun sampai ke tingkat RT RW berjalan sebagaimana yang kita rencanakan bersama karena dengan turunnya dana desa di semua desa maka bukan lagi pemerintah yang membangun desa tetapi desa yang membangun dirinya sendiri tinggal bagaimana pemerintah selaku tokoh masyarakat, aparat dan BPD(Badan Permusyawaratan Desa) bersama-sama merencanakan apa yang menjadi prioritas yang harus didahulukan untuk dikerjakan. Contoh pembangunan di Desa Taeng adalah sudah banyak jalan paving dan drainase yang telah dikerjakan.”⁷⁴

⁷³Fatimah, Kepala Badan Permusyawaratan Desa. “Wawancara” pada Tanggal 12 April 2020 Pukul 16.50 Wita

⁷⁴Nurdin Yasin, Kepala Desa, ”Wawancara” pada Tanggal 09 Maret 2020 Pukul 11.15 Wita.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang menjadi prioritas adalah yang telah disepakati oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melalui MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) desa.

RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam menyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif yang diikuti oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan unsur masyarakat desa.

Hasil wawancara dengan Muh. Kasim, SH. Mengatakan bahwa:

“Pembangunan Desa dituangkan ke dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Rencana pembangunan masyarakat Desa berlaku 6 tahun jadi kita tidak bisa bekerja kalau yang tidak tercakup di dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) turunannya dari RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) Desa sifatnya 1 (Satu) tahun berlakunya dan semuanya dibentuk dalam perdes (Peraturan Desa). Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa”.⁷⁵

Dapat diketahui bahwa pembangunan desa tidak bisa terlaksana jika tidak tercantum dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan).

Perencanaan pembangunan merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD (Badan

⁷⁵Muh Kasim, Sekretaris Desa, “Wawancara” pada Tanggal 05 Februari 2020 Pukul 10.20 Wita.

Permusyawaratan Desa) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pendapat dari Muh. Asyari selaku Kepala Seksi Pembangunan mengatakan bahwa:

“Pertama dilakukakan adalah perencanaan pembangunan desa. Ada beberapa tempat di Desa Taeng yang diadakan pembangunan misalnya drainase, Talud, jalan paving, jalan tani dan sebagainya jadi pembangunan di Desa Taeng cukup berkembang”.⁷⁶

Pembangunan di desa meliputi pekerjaan drainase, talud, paving blok dan jalan tani yang selalu menjadi prioritas pembangunan desa.

Kendala pembangunan desa merupakan suatu rintangan atau keadaan yang membatasi pencapaian pembangunan yang telah direncanakan.

Pendapat Rifandi, S.Pd mengenai pembangunan desa mengatakan bahwa:

“pembangunan di Desa Taeng yang saya amati selalu mengutamakan hal-hal yang penting yang dibutuhkan dan lebih bermanfaat bagi warga setempat itu yang selalu diutamakan untuk dibangun misalkan pembangunan jalan paving blok, renase dan sebagainya. Adapun kendala yang biasa terjadi adalah pembebasan lahan, terkadang ada warga yang ingin jalannya bagus tetapi tidak mau mengibahkan lahannya untuk dijadikan paving”.⁷⁷

Pada umumnya pembangunan yang dilaksanakan di Desa Taeng selalu mengutamakan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Desa Taeng itu sendiri.

⁷⁶Muh Asyari, Kepala Seksi Pembangunan, “*Wawancara*” pada Tanggal 05 Februari 2020 Pukul 16.00 Wita.

⁷⁷Rifandi, Kepala Urusan Keuangan, “*Wawancara*” pada Tanggal 09 Maret 2020 Pukul 11.00 Wita.

MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) desa merupakan agenda acara tahunan yang diselenggarakan desa sebagai salah satu upaya dalam melibatkan masyarakat yang ada di desa.

Pendapat Muhammad Nur, S.Sos mengatakan bahwa:

“Masalah pembangunan yang menjadi prioritas adalah yang telah disepakati oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melalui musrenbang (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) desa. Pembangunan itu sendiri terbagi atas beberapa pengurus ada yang namanya pengelola pembangunan dalam hal ini terbagi 3 yaitu ketua, sekretaris dan bendahara, ini yang mengelola masalah pembangunan dan berkoordinasi dengan kepala desa itu sendiri. Dilihat dari pembangunan desa selama ini, untuk masalah infrastruktur lebih condong kepada drainase dengan jalan paving atau jalan blok dan belum masuk kepada jalan-jalan provinsi karena sudah diatur oleh pemerintah daerah jadi pemerintah desa hanya mengatur tentang pembangunan infrastruktur masalah drainase dengan jalan-jalan lorong atau lebih condong kepada jalan tani dengan jalan paving.”⁷⁸

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa meliputi pembangunan drenase, paving blok, dan jalan tani sedangkan untuk jalan provinsi dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dari pembahasan di atas dapat dibuktikan bahwa dalam mewujudkan pembangunan di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yaitu dengan melaksanakan kerja sama antara pemerintah desa sampai jajaran terendah dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Mengenai pembangunan di Desa Taeng sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan terlaksananya program kerja pembangunan desa dengan baik. Kemudian pembangunan pada bidang infrastruktur

⁷⁸Muhammad Nur, Kepala Urusan Kesejahteraan, “Wawancara” pada Tanggal 12 Maret 2020 Pukul 21.43 Wita.

yaitu: pembuatan paving blok di beberapa lokasi, pembangunan posyandu, pekerjaan talud, plat duiker, pembuatan drainase, dan pembangunan jamban keluarga sebanyak 4 unit yang diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Kemudian pemanfaatan sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan jahit menjahit, kerajinan tangan seperti pembuatan tas pesta, pelatihan administrasi PKK, pelatihan dasa wisma dan pelatihan kader sandang pangan yang bertujuan agar sumber daya manusia yang ada di Taeng dapat maju.

Dari pembahasan mengenai Manajemen Kinerja Aparatur Desa dalam Mewujudkan Pembangunan di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen kinerja aparatur desa yang ada di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik yang dimulai dari sebuah perencanaan yang baik, yang melibatkan semua warga desa untuk mengemukakan aspirasinya melalui BPD (Badan permusyawaratan Desa) pada kegiatan MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan). Setelah hasil MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) rampung kemudian pemerintah desa serta jajarannya yang melaksanakan program kerja dalam pengawasan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Meskipun dalam hal evaluasi kinerja belum terlaksana dengan baik, yang disebabkan oleh pemerintah desa yang kurang mengevaluasi kinerja bawahannya.

2. Pembangunan di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan terlaksananya program kerja pembangunan desa dengan baik serta kerjasama antara BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pembangunan Desa meliputi masalah infrastruktur yaitu: Pembuatan paving blok di beberapa lokasi, pembangunan posyandu, pekerjaan talud, plat duiker, pembuatan drainase, dan pembangunan jamban keluarga sebanyak 4 unit

yang diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Kemudian pemanfaatan sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan jahit menjahit, kerajinan tangan seperti pembuatan tas pesta, pelatihan administrasin pkk, pelatihan dasa wisma dan pelatihan kader sandang pangan yang bertujuan agar sumber daya manusia yang ada di Desa Taeng dapat maju.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pencapaian secara maksimal dalam pembangunan desa yang diimplementasikan melalui program ADD (Alokasi Dana Desa), maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal diantaranya :

1. Pelatihan bagi perangkat desa selaku tim pelaksana desa tentang manajemen pembangunan desa
2. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang efektif.
3. Diusahakan agar tanah pembangunan Kantor Desa Taeng dijadikan hak milik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anulKarim.
- AB, Syamsuddin. *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial*, Ponorogo: Wade Group, 2017.
- Alweni Thomas J, *Penilaian Kinerja dan Stndar Kinerja Seri Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bhuana Ilmun Komputer, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi. VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arsip, Kantor Desa Taeng, Tahun 2019.
- Azra, Azzumardi, *Pendidikam Islam Trandi dan Modernisasi Menuju millennium Baru*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1999.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2018.
- Christine dan Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Daft. Richald L., *Management*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Jakarta: Raja Rafindo Persada, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodolgi Research* Yogyakarta: UGM Press, 1999.
- Kabul Ali Mahi, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jl. Kebayun: KENCANA, 2017.
- Kriyanto, Racmat. *Tekhnik Praktis Riset Komunikasi*, Edisi Pertama cetakan IV Jakarta:Kencana, 2009.
- sKuswandi, *Cara Mengukur Kepuasan Kerja*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2004.
- Komoroditomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Lebas, M, *Performance Measurement and performance*, International Journal of Prduction Economics, 1995.
- Lubis, Ibrahim, *Pengertian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Galia Indonesia, 1996.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.

- Munir Muhammad dan Ilahi Wahyu, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Krta Karya, 1998.
- Nitisemito, Ec Alex S. *Menimbulkan Semangat Dan Kegairahan Kerja Karyawan*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982.
- Palupi Sri, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, Lakpesdam PBNU Jakarta 2016.
- Pristiyanto Djuni, *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, Jakarta Selatan: Yayasan Penabulu, 2015.
- Riwu Josep Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Ngara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Shihab M Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siswanto H.B, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Sugiyono, *Metode Peneitian, kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suprayogo Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Terry George R, *Prinsip-Prinsip Manajemen* , Jakarta, Bumi Aksara, 2012.
- Tilaar, A. R, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Dalam Perspektif Abad 2*, Magelang: Tera Indonesia, 1999.
- Usman Husain dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* Cet. IV: Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Grafindo Persada, 2016.
- Wibisiono Dermawan, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta: Grafindo Persada, 1993.
- Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Murni, Manajemen Kinerja dalam Membangun Sumber Daya Islami pada Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, *Skripsi*. Makassar, fak Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Wahyuni Sri, “Penerapan Manajemen Kinerja dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang”, *Skripsi*. Makassar, fak Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

www.rensingbat.desa.id, diakses tanggal 14 Januari 2020 pkl. 19.50 Wita.

<https://pengertianmenurutparaahli.net> diakses tanggal 18 September 2019 pkl. 11.59 Wita.

<https://aceh.tribunnews.com/amp/2016/11/04/pembangunan-dalam-perspektif-islam?page=1>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020 pkl. 10:10 Wita.

<https://mahasiswateller.blogspot.com/2016/03/makalah-manajemen-kinerja-islam.html?m=1>, diakses pada tanggal 1 Februari 2020 pkl. 14:02 Wita

<https://media.neliti.com/media/publications/1094-ID-pentingnya-kualitas-aparat-pemerintah-desa-dalam-pembangunan-di-desa-lantung-kec.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020 pkl. 20:01 Wita.

Meiske Tinneke Tumbel, *Analisis Bantuan Desa Terhadap Pembangunan Desa*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol. 1 No.2. 2015.

Jurnal ilmu pemerintahan,2 (3) jurnal.ip.fisip-unmul.ac.id.2014.

LAMPIRAN



Kantor Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa



Peta tata ruang wilayah Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

PROFIL DESA / KELURAHAN
IDENITAR

DATA UMUM

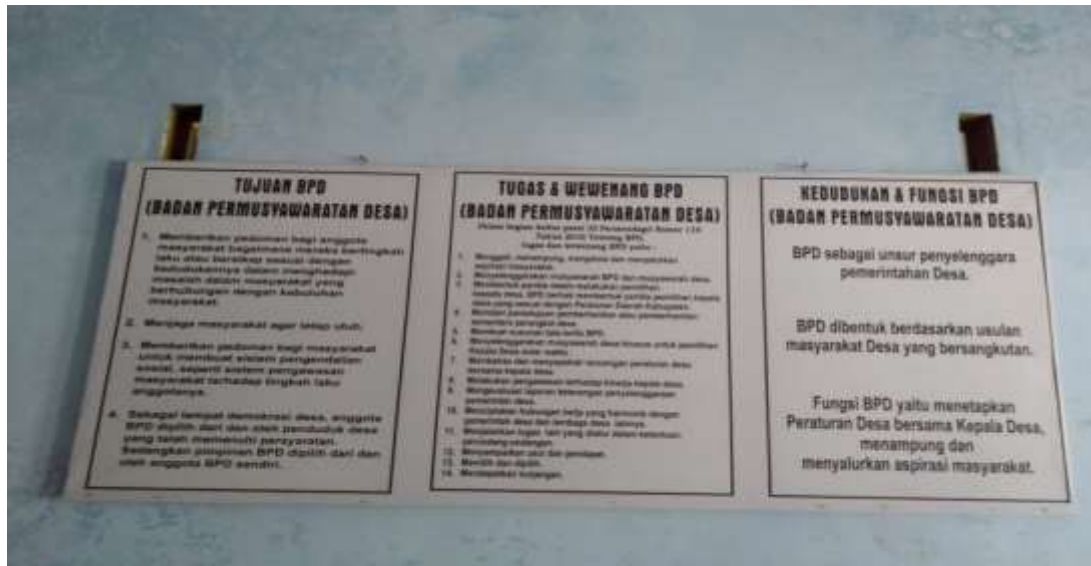
KEADAAN PENDUDUK DAN MATA PERCAHARIAN

KEADAAN LAIN-LAIN

Profi Desa Taeng



Ruangan rapat BPD (Badan Permusyawaratan Desa)



Tujuan, tugas dan fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa)



Ruangan staf kantor Desa Taeng



Wawancara dengan Kepala Desa Taeng
(H. Nurdin Yasin)



Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan
Rifandi, S.Pd



Wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan
Muhammad Nur, S.Sos



Wawancara dengan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
Fatimah



wawancara dengan Kepala Seksi Pembangunan

Muh Asyari



Wawancara dengan Sekretaris Desa

Muh. Kasim, SH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar
 Kampus II: Jl. H. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong, Gowa ■ (0411) 841879,
 Web: <http://fdk.uin-alauddin.ac.id> e-mail: fak.dakwah.komunikasi@uin-alauddin.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan mengoreksi seluruh isi Proposal mahasiswa **an. Rahmayani NIM. 50400116053** dengan judul "*Manajemen Kinerja Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*" maka kami menyatakan layak untuk diajukan ke *Seminar Proposal*

Pembimbing I

Dr. Irwan Misbach, SE., M.Si
 NIP. 19730116 200501 1 004

Pembimbing II

Dra. St. Nasriah, M.Sos.I
 NIP. 19620811 199102 2 001

Mengetahui
 Wakil Dekan I Bid. Akademik
 Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Dr. Irwan Misbach, SE., M.Si
 NIP. 19730116 200501 1 004

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Rahmayani
 Profesi/Status : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
 Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Gusung Desa taeng

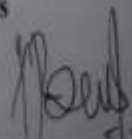
2. Nama Informan : FATIMAH
 Profesi/Jabatan : KETUA BPD DESA TAENG
 Umur : 44 TAHUN
 Asal : TAENG

Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak (penulis dan informan), telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 24 Januari 2020 s/d 24 Februari 2020, yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara, penulis tetap berpedoman pada kaedah wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.

Gowa, 2 April 2020

Informan

FATIMAH

Penulis

Rahmayani
 NIM : 50400116053

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

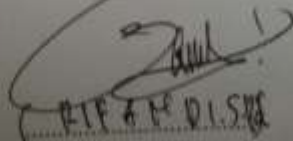
1. Nama : Rahmayani
 Profesi/Status : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
 Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Gusung Desa taeng

2. Nama Informan : Rifandi, S.Pd.
 Profesi/Jabatan : Kaur Keuangan
 Umur : 28 tahun
 Asal : Sl. Pelita Taeng, Kecamatan

Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak (penulis dan informan), telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 24 Januari 2020 s/d 24 Februari 2020, yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara, penulis tetap berpedoman pada kaedah wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.

Gowa, 09, Maret 2020

Informan


RIFANDI, S.Pd.

Penulis


Rahmayani
 NIM : 50400116053

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


1. Nama	: Rahmayani
Profesi/Status	: Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Fakultas/Jurusan	: Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Gusung Desa taeng
2. Nama Informan	: <u>H. MURDIN YASIN</u>
Profesi/Jabatan	: <u>KEPALA DESA TAENG</u>
Umur	: <u>52 THW</u>
Asal	: <u>GOWA</u>

Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak (penulis dan informan), telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 24 Januari 2020 s/d 24 Februari 2020, yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara, penulis tetap berpedoman pada kaedah wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.

Gowa, 09 Maret 2020

Informan

H. MURDIN YASIN

Penulis

Rahmayani
 NIM : 50400116053

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama	: Rahmayani
Profesi/Status	: Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Fakultas/Jurusan	: Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Gusung Desa taeng
2. Nama Informan	: MUHAMMAD NUR, S.Sos
Profesi/Jabatan	: KAS KESAJAHTERAAN
Umur	: 26 TAHUN
Asal	: JL PELITA TAENG

Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak (penulis dan informan), telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 24 Januari 2020 s/d 24 Februari 2020, yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara, penulis tetap berpedoman pada kaedah wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.

Gowa, 12 Maret 2020

Informan



MUHAMMAD NUR, S.Sos

Penulis



Rahmayani

NIM : 50400116053

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

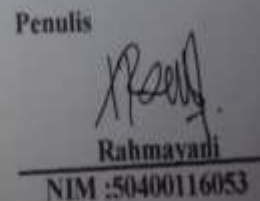
1. Nama	: Rahmayani
Profesi/Status	: Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Fakultas/Jurusan	: Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Gusing Desa taeng
2. Nama Informan	: MUH. KASIM, SH.
Profesi/Jabatan	: SEKRETARIS DESA
Umur	: 48 Tahun
Asal	: Taeng

Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak (penulis dan informan), telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 24 Januari 2020 s/d 24 Februari 2020, yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara, penulis tetap berpedoman pada kaedah wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.

Gowa, 05 Februari 2020

Informan

 MUH. KASIM, SH.

Penulis

 Rahmayani
 NIM : 50400116053

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama	: Rahmayani
Profesi/Status	: Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Fakultas/Jurusan	: Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Gusung Desa taeng
2. Nama Informan	: <u>MUH. ASYARI</u>
Profesi/Jabatan	: <u>KAWU PEMISANGILAN</u>
Umur	: <u>23</u>
Asal	: <u>GUSUNG DESA TAENG</u>

Dengan ini menyatakan, bahwa masing-masing pihak (penulis dan informan), telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 24 Januari 2020 s/d 24 Februari 2020, yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara, penulis tetap berpedoman pada kaedah wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.

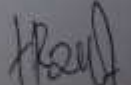
Informan



MUH. ASYARI

Gowa, 5 Februari 2020

Penulis



Rahmayani
NIM :50400116053

RIWAYAT HIDUP



Rahmayani, lahir di Cambaya Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada tanggal 26 September 1997 dari ayahanda Tajuddin Daeng Talle dan Ibunda Rosmina Daeng Nginga. Penulis menempuh pendidikan formal pada tahun 2003-2009 di SD Inpres Bontoala 1. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP ASKARI Pallangga pada tahun 2009-2012. Pada tahun 2012-2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sungguminasa. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) Alauddin Makassar melalui jalur UMM dan diterima di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah. Kemudian terakhir penulis membuat skripsi dengan judul “Manajemen Kinerja Aparatur Desa dalam Mewujudkan Pembangunan di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.